



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

BerAKHLAK

KUMHAM  
PASTI

REFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA



LAPORAN PELAKSANAAN  
HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
SATUAN KERJA B03 TRIWULAN I TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

## KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan I Tahun 2023. menghimpun evaluasi pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah sepanjang Triwulan I Tahun 2023 pada kegiatan dari bulan Januari s.d. Maret 2023. Penyelenggaraan evaluasi berkolerasi pada capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan I Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan I Tahun 2023, ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pengawasan pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua. Amin.



**Kepala Divisi Administrasi**

**Andi Basmal**  
**NIP. 197202151992031002**



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA TRIWULAN I TAHUN 2023**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**  
**TAHUN 2023**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Hukum dan HAM menetapkan target kinerja sebagai buah pikir yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM termasuk pada seluruh Kantor Wilayah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, maka diperlukan monitoring terhadap capaian target kinerja secara berkala. Monitoring tersebut dilaksanakan untuk menjamin capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.1-PR.04.05-218 tanggal 18 Maret 2023 hal Penyampaian Pelaporan B03 Monitoring Kinerja.

**2. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melaporkan capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara secara berkala (triwulan). Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk melakukan monitoring capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada B03 Triwulan I tahun 2023.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- o. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan B03 Monitoring Kinerja.

## B. Kegiatan yang dilaksanakan

Melakukan monitoring capaian target kinerja B01, B02, B03 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada setiap Divisi dengan kegiatan.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B03 Tahun 2023 dan Penyusunan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIT – Selesai  
Pakaian : PDH II  
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah  
Link Zoom : [shorturl.at/FIQU3](https://shorturl.at/FIQU3)  
Meeting ID : 811 7266 1002  
Passcode : KUMHAM2023

Rapat ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Administrasi beserta pelaksana.

2. Monitoring upload data dukung pada *website* kinerja.kemenkumham.go.id. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan data dukung pada masing-masing poin capaian target kinerja dari seluruh divisi serta ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan. Selain itu, monitoring capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian target kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara hingga pelaporan target kinerja B03 Triwulan I tahun 2023 yang telah dilaksanakan *upload* hingga tanggal 5 April 2023.

## C. Hasil yang dicapai

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B03 Tahun 2023 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Rapat dilaksanakan dan membahas terkait capaian target kinerja Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh capaian kinerja pada B01, B02, B03 telah memenuhi target yang telah ditentukan,
2. Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Bapak Andi Basmal. Dalam kesempatannya, Kepala Divisi Administrasi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar mampu menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara merencanakan Target Kinerja dengan baik, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan yang

direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan,

3. Percepatan capaian kinerja B03 triwulan I, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
  - KOMITMEN dalam penyampaian laporan capaian kinerja yang disampaikan UPT ke Kantor Wilayah setiap bulannya;
  - Pentingnya peran pimpinan untuk melakukan PEMANTAUAN terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas elektronik (TNDE);
  - *REVIEW* dilakukan oleh setiap pelaksanaan kinerja anggaran , agar laporan capaian kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya;
  - PERHATIAN KHUSUS dilakukan apabila dalam penyampaian laporan capaian kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
  - PENYELESAIAN penyampaian laporan oleh Kantor Wilayah selaku satuan kerja pembina di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap triwulan setiap tahunnya.
4. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui monitoring progres pencapaian Perjanjian Kinerja dengan melihat indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala UPT.
5. Seluruh Kantor Wilayah dan UPT telah menyelenggarakan SPIP dan mengimplementasikan Manajemen Risiko untuk pencegahan pungli dan gratifikasi.
6. Pelaksanaan kebijakan terbaru mengenai revisi anggaran bahwa setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui Kantor Wilayah.
7. Melakukan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan UPT melalui SIPP dan media lainnya setiap hari.
8. Seluruh Satuan Kerja untuk tetap melakukan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

#### D. Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi			Keterangan
			Jan	Feb	Mar	
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,76	3,63	3,73	Berdasarkan hasil survei 3AS
2	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)	-	-	-	Dapat terlihat pada Triwulan IV(Desember).
3	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	-	-	-	Tidak ada tahanan yang <i>overstaying</i> .
4	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	-	-	-	Belum ada kegiatan
5	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	-	-	-	Data dapat terlihat pada Triwulan II.
6	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
7	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
8	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
9	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
10	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
11	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
12	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
13	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi			Keterangan
			Jan	Feb	Mar	
14	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
15	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
16	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
17	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
18	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
19	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
20	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
21	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	-	-	-	Dapat dilihat pada Triwulan II
22	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	-	-	-	Tidak terdapat pengaduan
23	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	-	-	-	Tidak terdapat gangguan kamtib.
24	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	-	-	-	Tidak terdapat gangguan kamtib.
25	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	-	-	-	Tidak terdapat gangguan kamtib.
26	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	-	-	-	Tidak terdapat pengaduan
27	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	-	-	-	Tidak terdapat gangguan kamtib.
28	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	-	-	-	Tidak terdapat gangguan kamtib.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi			Keterangan
			Jan	Feb	Mar	
29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	-	-	-	Tidak terdapat gangguan kamtib.
30	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)	3,63	3,71	3,81	Hasil survei 3AS (rata-rata nilai survei 2 kantor imigrasi se- Maluku Utara
31	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)	-	-	-	Nilai berasal dari Ditjen Imigrasi dan diperoleh pada akhir tahun.
32	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%				Dapat dilihat pada B03.
33	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%				Pengaduan yang masuk masih dalam proses penyelesaian
34	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan	12 Layanan	10 Layanan	15 Layanan	
35	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan.
36	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	-	-	-	Belum terdapat pengaduan masyarakat.
37	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	-	-	-	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II dan III.
38	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan.
39	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan.
40	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	-	-	-	Kegiatan belum dilaksanakan.
41	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%	100%	100%	Seluruh permohonan raperda yang masuk telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah.
42	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	-	-	-	Akan dilaksanakan pada triwulan II.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi			Keterangan
			Jan	Feb	Mar	
43	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	-	-	-	Akan terlaksana pada triwulan II dan III.
44	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	-	-	-	Dapat dilihat pada awal April 2023
45	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	-	-	-	Dapat dilihat pada awal April 2023
46	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	-	-	-	Dapat terlihat pada Triwulan IV (Desember).
47	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	-	-	-	Dapat terlihat pada Triwulan III/IV.
48	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	-	-	-	Dapat terlihat pada Triwulan IV (Desember).
49	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	-	-	-	Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM dilakukan 3 periode per tahun yaitu B04, B08 dan B12. Untuk periode pelaporan Aksi HAM B04 dimulai pada tanggal 28 April sampai 5 Mei 2023.
50	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	-	-	-	Tim Penilai Pusat di Direktorat Jenderal HAM akan melakukan penilaian dan hasil dari penilaian tersebut (Kabupaten/Kota yang berpredikat Peduli HAM) akan diumumkan pada bulan Desember 2023 menjelang peringatan hari HAM se dunia.
51	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	-	-	-	Pelaksanaan Diseminasi HAM akan dilaksanakan pada triwulan kedua yaitu sekitar bulan Mei 2023.
52	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	-	-	-	Belum terdapat aduan yang komas.

## E. Hasil Evaluasi Capaian Target Kinerja B03 Triwulan I Tahun 2023

Merujuk Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan B03 Monitoring Kinerja. Progres pelaksanaan target kinerja B01, B02 dan B03 pada website [www.kinerja.kemenkumham.go.id](http://www.kinerja.kemenkumham.go.id) dengan capaian target kinerja sebagai berikut:

- **Divisi Administrasi** telah melaksanakan 100% target kinerja di B01 s/d B03 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pemasarakatan** telah melaksanakan 100% target kinerja di B01 s/d B03 dan telah melakukan unggah data dukung ke website t target kinerja;
- **Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan 100% target kinerja di B03 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan 100% target kinerja di B01 s/d B03 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara pada Triwulan I B01, B02 dan B03 telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target Kinerja yang telah disusun oleh Kementerian. Tim Evaluasi Kantor Wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja B03 Twiwulan I Tahun 2023 berdasarkan data dukung yang telah di laporkan melauai aplikasi Target Kinerja Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

### ➤ DIVISI ADMINISTRASI

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	ACTION PLAN	KET
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>				
<b>1</b>	<b>Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022</b>			
	<b>B01</b>	Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Kanwil	Tersusunnya Dokumen Perencanaan di lingkungan Kanwil Maluku	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP</b>			
	<b>B01</b>	Koordinasi dengan APIP Kumham	Laporan Koordinasi APIP Itjen Kumham RI	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Pelaksanaan Workshop (Bimtek)	Laporan Pelaksanaan Workshop	<b>Sudah</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	ACTION PLAN	KET
			(Bimtek) SPIP Kanwil Kemenkumham Malut B02 Tahun 2023	Di Upload
	B03	1.Pembentukan TIM Penilaian SPIP Kanwil 2.Melakukan Sosialisasi /Pendampingan penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	Tersusun TIM Penilaian SPIP Kanwil	Sudah Di Upload
<b>3</b>	<b>Implementasi Manajemen Risiko (MR)</b>			
	B03	Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil: 1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Pelaksanaan Workshop Penerapan MR	Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil: 1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Pelaksanaan Workshop Penerapan MR	Sudah Di Upload
<b>4</b>	<b>Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi</b>			
	B03	1. Membuat SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT Apabila melakukan usulan revisi anggaran belanja modal harus melalui persetujuan Kantor Wilayah 2. Satuan kerja melakukan analisis usulan revisi belanja modal sebelum diusulkan ke kanwil	Tersusun laporan usulan revisi anggran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui kantor wilayah	Sudah Di Upload
<b>5</b>	<b>Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN</b>			
	B03	Identifikasi, inventarisasi atas aset berupa tanah dan bangunan	Teridentifikasi, inventarisasi atas aset berupa tanah dan bangunan	Sudah Di Upload
<b>6</b>	<b>Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan</b>			
	B03	1. Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait kelayakan gedung dan bangunan 2. Penyusunan TOR/RAB revitalisasi gedung dan bangunan Kantor Wilayah dan Satker 3. Pengajuan surat usulan revitalisasi gedung dan bangunan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan	Telah tersusun usulan dari kanwil terkait revitalisasi gedung dan bangunan telah dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan	Sudah Di Upload
<b>7</b>	<b>Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah</b>			
	B03	Inventarisasi dan identifikasi aplikasi khusus unit utama yang dapat digunakan di satker dan kantor wilayah sesuai bidang tugas masing-masing	Terinventarisasi dan identifikasi aplikasi khusus unit utama yang dapat digunakan di satker dan kantor wilayah sesuai bidang tugas masing-masing	Sudah Di Upload
<b>8</b>	<b>Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya</b>			
	B03	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM	Glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP	Sudah Di Upload

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	ACTION PLAN	KET
		2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari		
9	<b>1. Meningkatnya kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University</b> <b>2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)</b>			
	<b>B03</b>	1. Pembentukan Tim Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 2. Pelaksanaan Sosialisasi pengembangan kompetensi melalui sistem informasi PK BANGKOM 3. Sosialisasi Sistem Informasi Corpu	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kanwil Malut	<b>Sudah Di Upload</b>
10	<b>Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil</b>			
	<b>B03</b>	1. Inventarisasi arsip dinamis dan inaktif yang akan digitalisasi dan dihapuskan 2. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	1. Terlaksananya Inventarisasi arsip dinamis dan inaktif yang akan digitalisasi dan dihapuskan 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip	<b>Sudah Di Upload</b>
11	<b>Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan</b>			
	<b>B03</b>	Kanwil melakukan evaluasi capaian kinerja satker	Laporan pelaksanaan evaluasi capaian kinerja satker di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI PEMASYARAKATAN**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN</b>				
1	<b>Percepatan pelaksanaan Back to Basic Pelayanan Tahanan Penyelenggaraan Pemasarakat Di Bidang</b>			
	<b>B01</b>	Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di UPT Lapas/Rutan Wilayah	Membuat SK Tim Supervisi Registrasi Tahanan terkait Penanganan overstaying tahanan di UPT Lapas/Rutan Wilayah	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	Mapping data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan overstaying tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasarakat di Bidang</b>			

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan</b>			
	<b>B01</b>	Pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	Pembentukan Tim pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Pihak ketiga yang terakreditasi maupun terverifikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rutan/Lapas dalam pelaksanaan Pelayanan tahanan	Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara Pihak ketiga yang terakreditasi maupun terverifikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Rutan/Lapas dalam pelaksanaan Pelayanan tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemyarakatan di bidang pengelolaan basan baran</b>			
	<b>B01</b>	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>4</b>	<b>Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pemyarakatan</b>			
	<b>B01</b>	Penyampaian SK Direktur Jenderal Pemyarakatan tentang Penetapan UPT Pemyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemyarakatan Tahun 2023	Penyampaian SK Direktur Jenderal Pemyarakatan tentang Penetapan UPT Pemyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemyarakatan Tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Koordinasi Kesiapan UPT Pemyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemyarakatan Tahun 2023	Koordinasi Kesiapan UPT Pemyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemyarakatan Tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Perencanaan Pelaksanaan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemyarakatan ke UPT Pemyarakatan	Perencanaan Pelaksanaan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemyarakatan ke UPT Pemyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>5</b>	<b>Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI</b>			
	<b>B01</b>	1. Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	1. Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. Penetapan UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>6</b>	<b>Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah Piloting</b>			
	<b>B01</b>	Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif	Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>7</b>	<b>Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi</b>			
	<b>B01</b>	Koordinasi dengan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. Koordinasi dengan pihak ketiga yang diproyeksikan menjadi mitra lapas	Koordinasi dengan Lapas yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian serta rencana kemitraan. Koordinasi dengan pihak ketiga yang diproyeksikan menjadi mitra lapas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra. b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama antara mitra dengan Lapas terkait pembinaan kemandirian sbb: a. Lapas yang tercantum dalam Kepmenkumham RI No. M. HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lapas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, melaksanakan kemitraan dengan minimal 3 (tiga) mitra. b. Lapas di luar Kepmenkumham RI tersebut diatas, melaksanakan kemitraan dengan minimal 1 (satu) mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>8</b>	<b>Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.</b>			
	<b>B01</b>	1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Tindak lanjut Surat Edaran tentang Target Kinerja Pelayanan pembinaan narapidana tahun 2023	1. Evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian pembinaan narapidana. 2. Tindak lanjut Surat Edaran tentang Target Kinerja Pelayanan pembinaan narapidana tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023	1. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Januari. 2. Sosialisasi SE tentang tindak lanjut target kinerja tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.55% narapidana mengikuti	1.55% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.55% narapidana mengikuti	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
		<p>program kemampuan intelektual. 3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari.</p>	<p>program kemampuan intelektual. 3.55% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.55% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Februari.</p>	
<b>9</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</b>			
	<b>B01</b>	<p>1. Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh UPT 2. Pembentukan UIP pada setiap UPT 3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di UPT 4. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 5. Sosialisasi konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>1. Sosialisasi dan internalisasi target kinerja pusat ke seluruh UPT 2. Pembentukan UIP pada setiap UPT 3. Jumlah Petugas yang belum dan yang sudah mendapatkan pelatihan di UPT 4. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 5. Sosialisasi konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	<p>1.Pembentukan UIP pada setiap UPT 2.Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 3.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>1.Pembentukan UIP pada setiap UPT 2.Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah 3.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	<p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuisi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat 3. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<p>1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuisi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Barat 3. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan</p>	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutaninformasi paten</b>			
	<b>B01</b>	Melakukan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan	Melakukan Implementasi Surat Edaran tentang Persiapan	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
		PEMILU 2024	PEMILU 2024	
	<b>B02</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)</b>			
	<b>B03</b>	1. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor Online kepada masyarakat/lembaga/instansi terkait oleh setiap satuan kerja 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi	1. Terlaksanakan Sosialisasi dan uji coba Paspor Online kepada masyarakat/lembaga/instansi terkait oleh setiap satuan kerja 2. laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan melampirkan dokumentasi	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)</b>			
	<b>B03</b>	1. Pembentukan tim klasifikasi SDM 2. Pembentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected) 3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	1. Terbentukan tim klasifikasi SDM 2. Terbentukan Tim pelatih teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected) 3. Pelatihan Teknis pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing</b>			
	<b>B03</b>	1. Pembentukan tim pendataan penjamin orang asing 2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan / organisasi	1. Terbentukan tim pendataan penjamin orang asing 2. Rapat dengan K/L terkait yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan perusahaan / organisasi	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

<b>NO</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>DATA DUKUNG ACTION PLAN</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>				
<b>1</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</b>			
	<b>B01</b>	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023</b>			
	<b>B02</b>	Pengecekan kesesuaian data Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 dari BPHN.	Pengecekan kesesuaian data Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 dari BPHN.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	1. Pemetaan Data Hasil Monev Administrasi Semester 1 2022 untuk dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara faktual; 2. Penyampaian jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantaun dan Evaluasi secara Faktual ke BPHN.	Telah disampaikan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Faktual ke BPHN	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah</b>			
	<b>B03</b>	1. Pembentukan Tim 2. Penyusunan Proposal 3. Presentasi Proposal 4. Evaluasi atas implementasi model intervensi Tahun 2022	4 Laporan Evaluasi atas implementasi model intervensi Tahun 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>4</b>	<b>Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham</b>			
	<b>B01</b>	Koordinasi terkait sosialisasi tugas fungsi dan aplikasi PPNS di wilayah	Koordinasi terkait sosialisasi tugas fungsi dan aplikasi PPNS di wilayah	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B02</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>5</b>	<b>Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)</b>			
	<b>B01</b>	Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);	Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);	Persiapan dan koordinasi awal penyebaran informasi layanan AHU di Wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan);	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>6</b>	<b>Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris</b>			
	<b>B01</b>	Pembentukan SK Tim	Pembentukan SK Tim	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	Penyusunan jadwal Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi SRA, Pengisian CDD, Mitigasi Risiko Pengguna Jasa & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Internalisasi SRA, Pengisian CDD Mitigasi penilaian risiko pengguna jasa oleh Notaris & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	Internalisasi SRA, Pengisian CDD Mitigasi penilaian risiko pengguna jasa oleh Notaris & Penilaian Notaris berisiko oleh LPP (Ditjen AHU)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>7</b>	<b>Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil &amp; Pengwil.</b>			
	<b>B01</b>	Pembentukan Tim	Pembentukan Tim	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Pemetaan jumlah Notaris sesuai data base	Pemetaan jumlah Notaris sesuai data base	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 25% dari jumlah Notaris di wilayah.	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 25% dari jumlah Notaris di wilayah.	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>8</b>	<b>Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</b>			
	<b>B01</b>	Persiapan dan koordinasi dengan	Persiapan dan koordinasi dengan	<b>Sudah</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
		instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data	instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data	Di Upload
	<b>B02</b>	Persiapan dan koordinasi dengan instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data	Persiapan dan koordinasi dengan instansi pusat terkait petunjuk teknis pelaksanaan pengumpulan data	Sudah Di Upload
	<b>B03</b>	Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Sudah Di Upload
<b>9</b>	<b>Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.</b>			
	<b>B01</b>	Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	Sudah Di Upload
	<b>B02</b>	Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	Sudah Di Upload
	<b>B03</b>	Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	Koordinasi persiapan tarja antara kanwil, instansi terkait, dan Ditjen AHU	Sudah Di Upload
<b>10</b>	<b>Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek</b>			
	<b>B01</b>	Kanwil mengikuti koordinasi konsep dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis One Village One Brand	Kanwil mengikuti koordinasi konsep dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis One Village One Brand	Sudah Di Upload
	<b>B02</b>	Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, terkait: 1. Pemetaan atau inventarisasi potensi One Village One Brand 2. Persiapan pelaksanaan Mobile IP Clinic terkait sarana prasarana layanan HKI di wilayah 3. Kanwil Koordinasi dengan MPIG untuk penyempurnaan Dokumen Deskripsi permohonan Indikasi Geografis yang sudah diajukan sebelumnya atau Kanwil melakukan koordinasi dengan stakeholder mengenai potensi IG baru	Laporan Koordinasi Potensi One Village One Brand atau Laporan Koordinasi Rencana Pelaksanaan Mobile IP Clinic	Sudah Di Upload
	<b>B03</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan	Terlaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah	Sudah Di Upload

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
		Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis		
<b>11</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah</b>			<b>Stakeholder</b>
	<b>B01</b>	- Inventarisasi dan Evaluasi MoU yang sudah dilakukan oleh Kanwil. - Tindak lanjut dan penyusunan MoU/ PKS kanwil dengan stakeholder tahun 2023."	- Inventarisasi dan Evaluasi MoU yang sudah dilakukan oleh Kanwil. - Tindak lanjut dan penyusunan MoU/ PKS kanwil dengan stakeholder tahun 2023."	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	- Kanwil mengikuti koordinasi Mobile IP Clinic yang dilaksanakan oleh DJKI - Kanwil menyusun rencana pelaksanaan Mobile IP Clinic dengan titik berat merek (dalam rangka tahun merek)	- Kanwil mengikuti koordinasi Mobile IP Clinic yang dilaksanakan oleh DJKI - Kanwil menyusun rencana pelaksanaan Mobile IP Clinic dengan titik berat merek (dalam rangka tahun merek)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi terkait layanan KI melalui 2 mekanisme : 1. IP Clinic (mall pelayanan publik, layanan sentra KI, dll) - bagi wilayah yang telah memiliki layanan KI/IP Clinic di MPP 2. Mobile IP Clinic - bagi wilayah yang belum memiliki layanan KI di MPP.	Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi terkait layanan KI melalui 2 mekanisme : 1. IP Clinic (mall pelayanan publik, layanan sentra KI, dll) - bagi wilayah yang telah memiliki layanan KI/IP Clinic di MPP 2. Mobile IP Clinic - bagi wilayah yang belum memiliki layanan KI di MPP.	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>12</b>	<b>Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria</b>			
	<b>B02</b>	Penyusunan SK TIM KKC	Draf SK TIM Kawasan Karya Cipta dan Laporan Koordinasi Persiapan Pemetaan Calon Kawasan Karya Cipta	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Mengikuti Sosialisasi dengan DJKI. Terkait KKC	Sosialisasi dengan DJKI. Terkait KKC	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>13</b>	<b>Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten</b>			
	<b>B01</b>	Memetakan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Terlaksananya pemetaan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang di Wilayah Maluku Utara	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>14</b>	<b>Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)</b>			
	<b>B03</b>	Pelaksanaan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan atas rencana tindak lanjut sertifikasi pusat belanja tahun 2022 serta tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional	Terlaksananya koordinasi dengan Direktorat Penyidikan atas rencana tindak lanjut sertifikasi pusat belanja tahun 2022 serta tahapan rencana kerja di tahun 2023 dengan ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>15</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM</b>			
	<b>B01</b>	Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2022 Provinsi,	Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM 2022 Provinsi,	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
		Kabupaten/Kota Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	Kabupaten/Kota Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	
	<b>B03</b>	Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	Koordinasi dan konsultasi capaian Aksi HAM tahun sebelumnya dengan instansi terkait	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>16</b>	<b>Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM</b>			
	<b>B01</b>	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM	Rapat persiapan penginputan laporan KKP HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada pemerintah Daerah	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>17</b>	<b>Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM</b>			
	<b>B01</b>	Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	Evaluasi dugaan pelanggaran /permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B02</b>	Tindak lanjut dugaan pelanggaran / permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	Tindak lanjut dugaan pelanggaran / permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B03</b>	Tindak lanjut dugaan pelanggaran / permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Tahun sebelumnya	Tindak lanjut dugaan pelanggaran / permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Tahun sebelumnya	<b>Sudah Di Upload</b>

## F. Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah melaksanakan pemenuhan data dukung dan pelaksanaan kegiatan target kinerja hingga Maret tahun 2023 seperti yang dilaporkan pada laporan ini. Adapun data realisasi anggaran per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	REALISASI	%
1	Rutan Weda	440,463,118	369,146,818	-	809,609,936	36.88%
2	Lembaga Pemasarakatan Jailolo	736,827,783	387,925,603	-	1,124,753,386	34.71%
3	Lpka Ternate	935,009,562	498,974,377	-	1,433,983,939	31.54%
4	Rupbasan Ternate	375,474,666	247,831,500	-	623,306,166	31.41%
5	Balai Pemasarakatan Ternate	660,840,061	217,234,900	-	878,074,961	31.12%
6	Lapas Perempuan Ternate	783,195,935	467,746,922	-	1,250,942,857	28.69%
7	Rumah Tahanan Negara Soasiu	653,125,164	544,375,299	-	1,197,500,463	28.53%
8	Setjen	2,064,207,699	1,418,387,193	182,142,500	3,664,737,392	27.70%
9	Rumah Tahanan Negara Ternate	978,813,320	440,492,283	-	1,419,305,603	26.86%
10	Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo	428,261,418	789,009,589	500,000,000	1,717,271,007	26.05%
11	Lembaga Pemasarakatan Tobello	941,373,056	436,660,159	-	1,378,033,215	25.72%
12	Lapas Kelas III Labuha	600,346,652	323,029,993	-	923,376,645	25.45%
13	Lembaga Pemasarakatan Sanana	922,476,601	339,180,984	-	1,261,657,585	24.30%
14	Ditjen PP	-	63,939,000	-	63,939,000	23.51%
15	Lembaga Pemasarakatan Ternate	1,039,224,559	757,301,902	-	1,796,526,461	23.17%
16	Ditjen Pemasarakatan	-	158,816,110	-	158,816,110	22.09%
17	Ditjen AHU	-	469,294,800	-	469,294,800	21.00%
18	Ditjen KI	-	332,871,830	-	332,871,830	20.97%
19	Balitbangham	-	52,864,660	-	52,864,660	20.87%
20	Ditjen HAM	-	57,692,000	-	57,692,000	20.35%
21	BPHN	-	264,619,000	-	264,619,000	20.10%
22	Ditjen Imigrasi	-	337,604,327	-	337,604,327	19.72%
23	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	810,842,986	1,071,991,669	-	1,882,834,655	19.22%
24	Bapas Kelas II Tidore	375,582,928	214,995,115	-	590,578,043	11.09%
		12,746,065,508	10,261,986,033	682,142,500	23,690,194,041	25.23%

## G. Simpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan pemenuhan data dukung target kinerja B01, B02, dan B03. Selain itu, diperlukan upaya preventif untuk mengurangi potensi permasalahan dan kendala pelaksanaan target kinerja pada Triwulan yang akan datang.

Adapun rekomendasi berupa saran yang dapat disampaikan dari hasil evaluasi capaian target kinerja berupa pemantauan dan analisis pencapaian target dari aplikasi kinerja Kemenkumham ini, dapat dijabarkan sbb:

- a. Senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pemenuhan data dukung target kinerja secara keseluruhan dengan para unit eselon I terkait agar memastikan nilai target kinerja dapat memperoleh nilai 100;
- b. Pada Triwulan berikutnya, akan rutin diadakan rapat bersama masing-masing divisi terkait capaian target kinerja setiap bulannya melalui aplikasi zoom sehingga pelaksanaan penginputan data dukung target kinerja dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

## H. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan I Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.



Ternate, 31 Maret 2023

Kepala Divisi Administrasi

Andi Basmal

NIP. 197202151992031002

# LAMPIRAN

# DOKUMENTASI

## RAPAT PELAKSANAAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA TRIWULAN I TAHUN 2023









**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**  
Jln Cengkeh Afo No 40 Ternate  
Tlp: +62.921 3122119 – 31328194 Fax: +62.921 3122118  
Website: <https://malut.kemenkumham.go.id>

---

20 Maret 2023

Nomor : W.29.PR.02.02 -1929  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B03 Tahun 2023

Yth, 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama  
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis  
3. Pejabat Administrasi

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara  
di tempat

Dalam rangka rencana evaluasi dan pengendalian pencapaian Target Kinerja Triwulan I B03 Kantor Wilayah Tahun 2023. Divisi Administrasi akan mengadakan kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B03 Triwulan I Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, dengan ini kami mengundang pejabat serta operator yang membidangi Aplikasi Smart DJA, E-Performance, serta pengelola anggaran untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Maret 2023  
Pukul : 09.00 WIT – Selesai  
Pakaian : PDH II  
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah  
Link Zoom : [shorturl.at/FIQU3](https://shorturl.at/FIQU3)  
Meeting ID: 811 7266 1002  
Passcode: KUMHAM2023

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi



Andi Basmal  
NIP. 197202151992031002

Tembusan :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.



## NOTULA

- Hari : Selasa
- Tanggal : 21 Maret 2023
- Pukul : 09.00 WIT sampai selesai
- Tempat : Aula Lantai 2
- Peserta Rapat : 1. Pimpinan Tinggi Pratama  
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
3. Pejabat Administrasi  
4. Pejabat Pengawas  
5. Operator Target Kinerja
- Agenda Rapat : Rapat Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja B03 Tahun 2023
- Hasil Rapat : 1. Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Bapak Andi Basmal. Dalam kesempatannya, Kepala Divisi Administrasi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar mampu menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara merencanakan Target Kinerja dengan baik, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan.
2. Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan bahwa untuk mencapai percepatan capaian kinerja B03 triwulan pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
- KOMITMEN dalam penyampaian laporan capaian kinerja yang disampaikan UPT ke Kantor Wilayah setiap bulannya;
  - Pentingnya peran pimpinan untuk melakukan PEMANTAUAN terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas elektronik (TNDE);
  - REVIEW dilakukan oleh setiap pelaksanaan kinerja anggaran, agar laporan capaian kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya;
  - PERHATIAN KHUSUS dilakukan apabila dalam penyampaian laporan capaian kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
  - PENYELESAIAN penyampaian laporan oleh Kantor Wilayah selaku satuan kerja pembina di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap triwulan setiap tahunnya.

3. Selain itu, dalam pelaksanaan Target Kinerja, Kepala Divisi Administrasi juga mengingatkan agar dalam melaksanakan pengukuran kinerja dilakukan melalui monitoring progres pencapaian Perjanjian Kinerja dengan melihat indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala UPT.
4. Kemudian, dihimbau agar seluruh Kantor Wilayah dan UPT telah menyelenggarakan SPIP dan mengimplementasikan Manajemen Risiko untuk pencegahan pungli dan gratifikasi.
5. Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan kebijakan terbaru mengenai revisi anggaran bahwa setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui Kantor Wilayah.
6. Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi mendorong agar selalu melakukan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan UPT melalui SIPP dan media lainnya setiap hari.
7. Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi mengingatkan bahwa pemenuhan data dukung RB untuk RKT agar diunggah paling lambat pada 26 Maret 2023, untuk WBK/WBBM paling lambat pada 31 Maret 2023, dan untuk laporan RB paling lambat pada 31 Maret 2023.
8. Selanjutnya, Kepala Divisi Administrasi menghimbau agar seluruh satuan kerja untuk tetap melakukan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
9. Terakhir, Kepala Divisi Administrasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan bagi yang menjalankan dan mengingatkan agar menyampaikan zakatnya melalui Baznas.

Notulen



Alhiriani

NIP. 198912172022032003

Mengetahui,  
Kepala Bagian Program dan Humas



Irwan Kadir

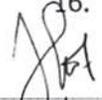
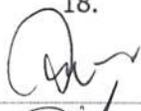
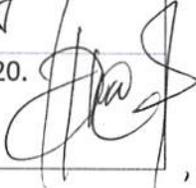
NIP. 198102042002121001



DAFTAR HADIR  
KEGIATAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA B03 TRIWULAN I TAHUN 2023

HARI/TANGGAL : SELASA/ 21 MARET 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Andi Basmal	Kadiv Administrasi	1.
2	Irwani Kadri	Kabag PA	2.
3	M KASIM UMASANGADJI	KABAG UMUM	3.
4	ANITA SAFITRI	KASUB PHBH-2 SDIH	4.
5	FATMAWATI BAUD	KASUB PKBMW	5.
6	S An Suroso, Dg.	KABAG BID TIKED.	6.
7	Jufri Hamid	Kasubbag P2L	7.
8	indra molko daryat	JFU	8.
9	Tungjung Ari Agi	JFT	9.
10	Rizkia Amelia	JFU	10.
11	DARMAWAN OTAPAR	JFU	11.
12	Joko Swanto	JFU	12.
13	SYAFI UDIN	JFu	13.
14	Monalisa	JFU	14.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
15	Nova Mustika	JFu	15. 
16	Posani tien laue	JFu	16. 
17	Alhiraiani	J#T	17. 
18	Asri Kusni Bshar	JFT	18. 
19	Abdul fbris	JFu	19. 
20	Silvanuy k.	JFu	20. 

Ternate, 21 Maret 2023

Ketua Panitia,



**Irwan Kadir**

**NIP. 19810204 200212 1 001**



# RAPAT EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA B03 TAHUN 2023



**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

**ARAHAN KEPALA DIVISI ADMINISTRASI**

21 MARET 2023

# LAPORAN CAPAIAN KINERJA



## A K U N T A B I L I T A S

01

Mampu merencanakan target kinerja dengan baik.



02

Menselaraskan apa yang dianggarkan dengan yang direncanakan.



03

Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan.



04

Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan.



## PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA B03 TRIWULAN I TAHUN 2023

01

**KOMITMEN** dalam penyampaian Laporan Capaian Kinerja yang disampaikan UPT ke KANTOR WILAYAH setiap bulannya,

02

Pentingnya peran Pimpinan untuk melakukan **PEMANTAUAN** terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas elektronik (TNDE).

03

**REVIEW** dilakukan oleh setiap pelaksana kinerja anggaran, agar laporan capaian kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya.

04

**PERHATIAN KHUSUS** dilakukan apabila dalam penyampaian laporan capaian kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah di tentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

05

**PENYELESAIAN** penyampaian Laporan oleh kantor wilayah selaku satuan kerja pembina di Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap Triwulan setiap tahunnya.

**PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA B03  
TRIWULAN I TAHUN 2023**

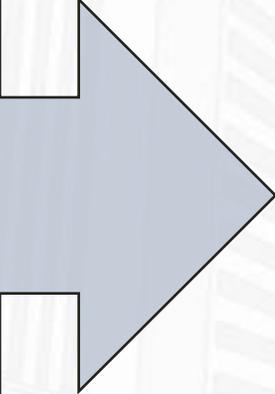
**PELAKSANAAN TARGET KINERJA**

- 1 MELAKSANAKAN PENGUKURAN KINERJA MELALUI MONITORING PROGRES PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DENGAN MELIHAT INDIKATOR KINERJA KAKANWIL, KADIV DAN KA UPT
- 2 SELURUH KANTOR WILAYAH DAN SATUAN KERJA TELAH MENYELENGGARAKAN SPIP
- 3 IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO (MR)
- 4 SETIAP USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL DARI SATUAN KERJA KE UNIT UTAMA WAJIB MELALUI KANTOR WILAYAH
- 5 MENINGKATNYA JUMLAH ASET BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERCATAT PADA SIMAK BMN
- 6 INVENTARISASI KEBUTUHAN REVITALISASI GEDUNG DAN BANGUNAN DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
- 7 INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI APLIKASI KHUSUS UNIT UTAMA YANG DAPAT DIGUNAKAN DI SATKER DAN KANTOR WILAYAH SESUAI BIDANG TUGAS MASING-MASING
- 8 GLORIFIKASI INFORMASI KINERJA DAN PEMBERITAAN YANG POSITIF PADA KANTOR WILAYAH DAN SATUAN KERJA MELALUI SIPP DAN MEDIA LAINNYA SETIAP HARI
- 9 TERLAKSANANYA DIGITALISASI ARSIP DINAMIS

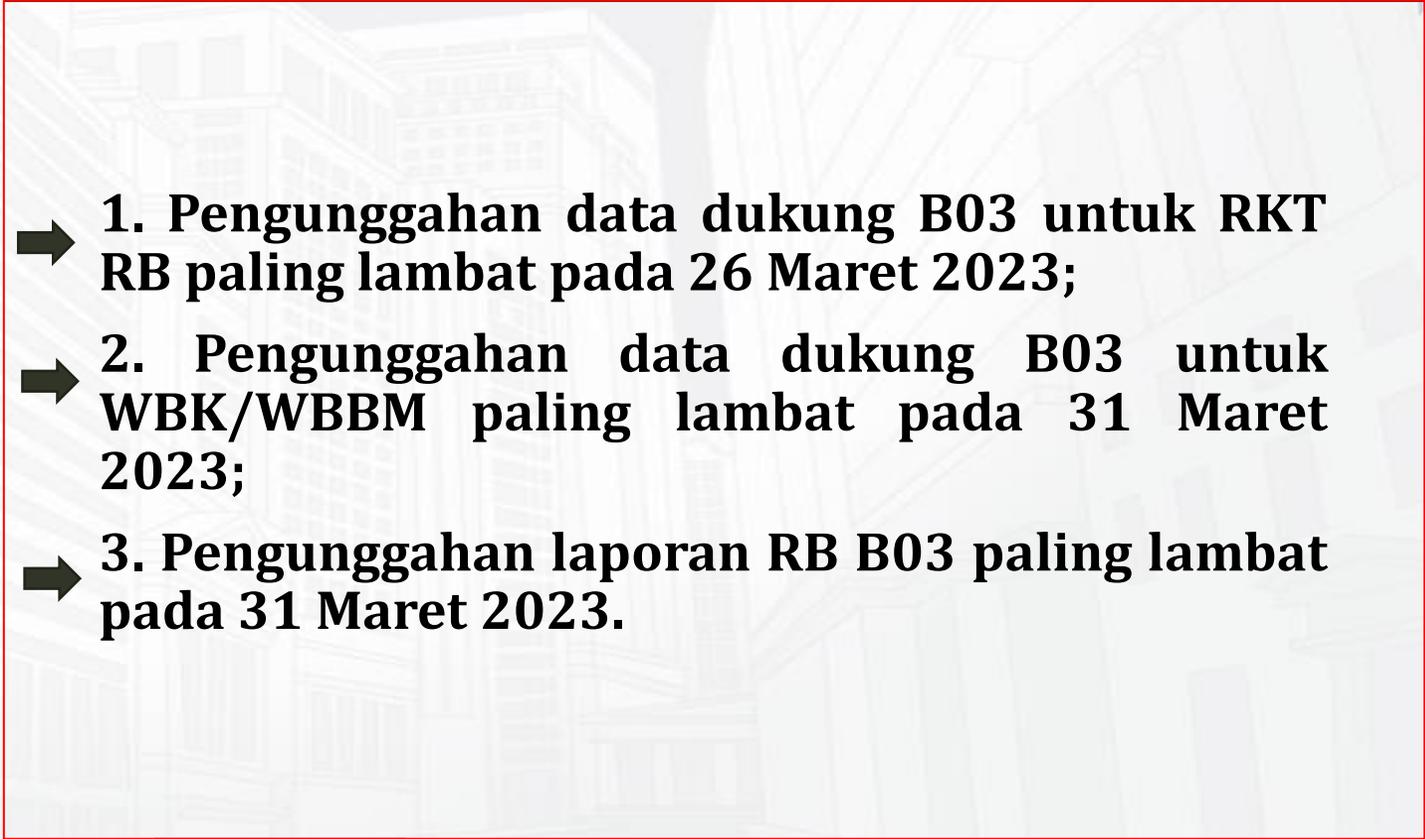
# TARGET KINERJA TAHUN 2023

Kepmenkumham : Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022





**PEMENUHAN  
DATA DUKUNG  
REFORMASI  
BIROKRASI**

- 
- ➔ **1. Pengunggahan data dukung B03 untuk RKT RB paling lambat pada 26 Maret 2023;**
  - ➔ **2. Pengunggahan data dukung B03 untuk WBK/WBBM paling lambat pada 31 Maret 2023;**
  - ➔ **3. Pengunggahan laporan RB B03 paling lambat pada 31 Maret 2023.**

# PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA B03 TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	SATUAN KERJA	MENGINPUT PERJANJIAN KINERJA PADA APLIKASI E-PERFORMANCE	LAPORAN BULAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
		TAHUN 2023	B03
1	Lapas Ternate	√	√
2	Lapas Sanana	√	√
3	Lapas Tobelo	√	√
4	Lapas Jailolo	√	√
5	Lapas Labuha	√	√
6	Rutan Ternate	√	√
7	Rutan Soasio	√	√
8	Rutan Weda	√	√
9	LPKA Ternate	√	√
10	LPP Ternate	√	√
11	Rupbasan Ternate	√	√
12	Bapas Ternate	√	√
13	Bapas Tidore	√	√
14	Kanim Ternate	√	√
15	Kanim Tobelo	√	√

# PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA B03 TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Kode   Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	684003   RUTAN WEDA	972,514,000	440,463,118	45.29%	1,222,969,000	369,146,818	30.18%	-	-	0.00%	2,195,483,000	809,609,936	1,385,873,064	36.88%
2	497840   LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1,770,543,000	736,827,783	41.62%	1,469,707,000	387,925,603	26.39%	-	-	0.00%	3,240,250,000	1,124,753,386	2,115,496,614	34.71%
3	352614   LPKA TERNATE	2,639,715,000	935,009,562	35.42%	1,906,326,000	498,974,377	26.17%	-	-	0.00%	4,546,041,000	1,433,983,939	3,112,057,061	31.54%
4	632712   RUPBASAN TERNATE	1,187,415,000	375,474,666	31.62%	772,474,000	247,831,500	32.08%	24,497,000	-	0.00%	1,984,386,000	623,306,166	1,361,079,834	31.41%
5	626161   BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1,909,234,000	660,840,061	34.61%	912,162,000	217,234,900	23.82%	-	-	0.00%	2,821,396,000	878,074,961	1,943,321,039	31.12%
6	418350   LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2,887,801,000	783,195,935	27.12%	1,471,669,000	467,746,922	31.78%	-	-	0.00%	4,359,470,000	1,250,942,857	3,108,527,143	28.69%
7	531891   RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2,723,091,000	653,125,164	23.98%	1,473,982,000	544,375,299	36.93%	-	-	0.00%	4,197,073,000	1,197,500,463	2,999,572,537	28.53%
8	649022   SETJEN	6,793,124,000	2,064,207,699	30.39%	6,256,618,000	1,418,387,193	22.67%	182,345,000	182,142,500	99.89%	13,232,087,000	3,664,737,392	9,567,349,608	27.70%
9	407499   RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2,907,790,000	978,813,320	33.66%	2,376,721,000	440,492,283	18.53%	-	-	0.00%	5,284,511,000	1,419,305,603	3,865,205,397	26.86%
10	662968   KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1,418,144,000	428,261,418	30.20%	4,293,298,000	789,009,589	18.38%	881,975,000	500,000,000	56.69%	6,593,417,000	1,717,271,007	4,876,145,993	26.05%
11	109152   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2,750,632,000	941,373,056	34.22%	2,608,129,000	436,660,159	16.74%	-	-	0.00%	5,358,761,000	1,378,033,215	3,980,727,785	25.72%
12	407503   LAPAS KELAS III LABUHA	1,761,309,000	600,346,652	34.09%	1,867,317,000	323,029,993	17.30%	-	-	0.00%	3,628,626,000	923,376,645	2,705,249,355	25.45%
13	109153   LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3,013,380,000	922,476,601	30.61%	2,178,567,000	339,180,984	15.57%	-	-	0.00%	5,191,947,000	1,261,657,585	3,930,289,415	24.30%
14	649027   DITJEN PP	-	-	-	272,000,000	63,939,000	23.51%	-	-	-	272,000,000	63,939,000	208,061,000	23.51%
15	652827   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3,732,598,000	1,039,224,559	27.84%	4,019,848,000	757,301,902	18.84%	-	-	0.00%	7,752,446,000	1,796,526,461	5,955,919,539	23.17%
16	649024   DITJEN PEMASYARAKATAN	-	-	-	719,077,000	158,816,110	22.09%	-	-	-	719,077,000	158,816,110	560,260,890	22.09%
17	649023   DITJEN AHU	-	-	-	2,234,412,000	469,294,800	21.00%	-	-	-	2,234,412,000	469,294,800	1,765,117,200	21.00%
18	649026   DITJEN KI	-	-	-	1,587,436,000	332,871,830	20.97%	-	-	-	1,587,436,000	332,871,830	1,254,564,170	20.97%
19	649030   BALITBANGHAM	-	-	-	253,345,000	52,864,660	20.87%	-	-	-	253,345,000	52,864,660	200,480,340	20.87%
20	649028   DITJEN HAM	-	-	-	283,561,000	57,692,000	20.35%	-	-	-	283,561,000	57,692,000	225,869,000	20.35%
21	649029   BPHN	-	-	-	1,316,698,000	264,619,000	20.10%	-	-	-	1,316,698,000	264,619,000	1,052,079,000	20.10%
22	649025   DITJEN IMIGRASI	-	-	-	1,712,140,000	337,604,327	19.72%	-	-	-	1,712,140,000	337,604,327	1,374,535,673	19.72%
23	480505   KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2,826,275,000	810,842,986	28.69%	5,910,514,000	1,071,991,669	18.14%	1,060,250,000	-	0.00%	9,797,039,000	1,882,834,655	7,914,204,345	19.22%
24	632047   BAPAS KELAS II TIDORE	694,184,000	375,582,928	54.10%	978,925,000	214,995,115	21.96%	3,651,940,000	-	0.00%	5,325,049,000	590,578,043	4,734,470,957	11.09%
<b>TOTAL</b>		<b>39,987,749,000</b>	<b>12,746,065,508</b>	<b>31.87%</b>	<b>48,097,895,000</b>	<b>10,261,986,033</b>	<b>21.34%</b>	<b>5,801,007,000</b>	<b>682,142,500</b>	<b>11.76%</b>	<b>93,886,651,000</b>	<b>23,690,194,041</b>	<b>70,196,456,959</b>	<b>25.23%</b>

# PERCEPATAN CAPAIAN KINERJA B03 TRIWULAN I TAHUN 2023

## REKAP DEVIASI HALAMAN III DIPA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA MARET 2023

No.	Kode Satker   Nama Satker	RPD Bulan Maret 2023			Realisasi Bulan Maret 2023			Deviasi Hal III DIPA			Persentase		
		51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53
1	109152   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	254.358.216	252.730.000	-	249.810.218	183.618.596	-	4.547.998	69.111.404	-	1,79%	27,35%	0,00%
2	109153   LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	255.716.740	214.019.248	-	244.039.740	142.394.410	-	11.677.000	71.624.838	-	4,57%	33,47%	0,00%
3	352614   LPKA TERNATE	258.158.999	217.636.999	-	253.258.898	217.636.563	-	4.900.101	436	-	1,90%	0,00%	0,00%
4	407499   RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	270.000.000	179.379.997	-	283.185.636	189.499.402	-	13.185.636	10.119.405	-	-4,88%	-5,64%	0,00%
5	407503   LAPAS KELAS III LABUHA	154.889.064	101.314.300	-	164.340.074	93.714.927	-	9.451.010	7.599.373	-	-6,10%	7,50%	0,00%
6	418350   LAPAS PEREMPUAN TERNATE	207.172.687	283.235.449	-	206.757.129	130.238.899	-	415.558	152.996.550	-	0,20%	54,02%	0,00%
7	480505   KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	215.165.241	434.834.759	160.000.000	206.134.532	275.381.687	-	9.030.709	159.453.072	160.000.000	4,20%	36,67%	100,00%
8	497840   LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	194.416.000	179.160.000	-	204.509.361	82.275.876	-	10.093.361	96.884.124	-	-5,19%	54,08%	0,00%
9	531891   RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	185.439.956	331.705.000	-	178.166.957	165.074.534	-	7.272.999	166.630.466	-	3,92%	50,23%	0,00%
10	626161   BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	192.208.085	74.538.078	-	180.104.550	165.778.200	-	12.103.535	91.240.122	-	6,30%	-122,41%	0,00%
11	632047   BAPAS KELAS II TIDORE	104.233.830	103.753.442	-	103.635.461	46.242.440	-	598.369	57.511.002	-	0,57%	55,43%	0,00%
12	632712   RUPBASAN TERNATE	97.796.410	75.000.000	-	99.080.410	79.996.500	-	1.284.000	4.996.500	-	-1,31%	-6,66%	0,00%
13	649022   SETJEN	554.518.563	774.103.437	182.345.000	552.768.563	711.198.831	34.756.500	1.750.000	62.904.606	147.588.500	0,32%	8,13%	80,94%
14	649023   DITJEN AHU	-	169.656.589	-	-	119.408.000	-	-	50.248.589	-	0,00%	29,62%	0,00%
15	649024   DITJEN PEMASYARAKATAN	-	67.391.994	-	-	67.527.249	-	-	135.255	-	0,00%	-0,20%	0,00%
16	649025   DITJEN IMIGRASI	-	264.018.962	-	-	116.104.241	-	-	147.914.721	-	0,00%	56,02%	0,00%
17	649026   DITJEN KI	-	89.138.895	-	-	54.912.830	-	-	34.226.065	-	0,00%	38,40%	0,00%
18	649027   DITJEN PP	-	29.888.989	-	-	29.889.000	-	-	11	-	0,00%	0,00%	0,00%
19	649028   DITJEN HAM	-	7.811.094	-	-	12.314.000	-	-	4.502.906	-	0,00%	-57,65%	0,00%
20	649029   BPHN	-	243.011.999	-	-	162.402.000	-	-	80.609.999	-	0,00%	33,17%	0,00%
21	649030   BALITBANGHAM	-	24.239.846	-	-	16.020.000	-	-	8.219.846	-	0,00%	33,91%	0,00%
22	652827   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	283.908.600	368.399.998	-	283.489.852	458.512.774	-	418.748	90.112.776	-	0,15%	-24,46%	0,00%
23	662968   KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	112.000.000	300.000.001	-	117.760.052	187.869.240	-	5.760.052	112.130.761	-	-5,14%	37,38%	0,00%
24	684003   RUTAN WEDA	129.238.653	220.000.000	-	122.135.953	59.937.294	-	7.102.700	160.062.706	-	5,50%	72,76%	0,00%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

10 Maret 2023 pukul 09.06 wit

### Keterangan:

Deviasi Positif (Penyerapan belum mencapai RPD)

Deviasi Negatif (Penyerapan melebihi RPD)



**TERIMA KASIH**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

**BerAKHLAK**  
BERAKHLAK BERKUALITAS BERKEMAJUAN

**KUMHAM  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**



**LAPORAN PELAKSANAAN  
HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
SATUAN KERJA B06 TRIWULAN II TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA**

## KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan II Tahun 2023. menghimpun evaluasi pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah sepanjang Triwulan II Tahun 2023 pada kegiatan dari bulan Januari s.d.Juni 2023. Penyelenggaraan evaluasi berkolerasi pada capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan II Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan II Tahun 2023, ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pengawasan pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua.  
Amin.



**Kepala Divisi Administrasi**

**Andi Basmal**  
**NIP. 197202151992031002**



---

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA B06 TRIWULAN II TAHUN**  
**2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**  
**TAHUN 2023**

## **A. Pendahuluan**

### **1. Umum**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Hukum dan HAM menetapkan target kinerja sebagai buah pikir yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM termasuk pada seluruh Kantor Wilayah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, maka diperlukan monitoring terhadap capaian target kinerja secara berkala. Monitoring tersebut dilaksanakan untuk menjamin capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.1-PR.04.05-218 tanggal 18 Maret 2023 hal Penyampaian Pelaporan Monitoring Kinerja.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melaporkan capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara secara berkala (triwulan). Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk melakukan monitoring capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada B06 Triwulan II tahun 2023.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- o. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan Monitoring Kinerja.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Melakukan monitoring capaian target kinerja B04, B05, B06 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada setiap Divisi dengan kegiatan.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B06 Tahun 2023 dan Penyusunan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Yang dilaksanakan pada:
  - Hari/tanggal :Rabu,31 Mei 2023
  - Pukul : 14.00 WIT – Selesai
  - Pakaian : PDH III
  - Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah

Rapat ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama,Pejabat Administrasi beserta pelaksana.

2. Monitoring upload data dukung pada *website* kinerja.kemenkumham.go.id. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan data dukung pada masing-masing poin capaian target kinerja dari seluruh divisi serta ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan. Selain itu, monitoring capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian target kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara hingga pelaporan target kinerja B06 Triwulan II tahun 2023 yang telah dilaksanakan *upload* hingga tanggal 5 Juli 2023.

## **C. Hasil yang dicapai**

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B06 Tahun 2023 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Rapat dilaksanakan dan membahas terkait capaian target kinerja Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh capaian kinerja pada B04, B05, B06 telah memenuhi target yang telah ditentukan,
2. Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Bapak Andi Basmal. Dalam kesempatannya, Kepala Divisi Administrasi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar mampu menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara merencanakan Target Kinerja dengan baik, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan yang

direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan,

3. Percepatan capaian kinerja B06 triwulan II, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
  - KOMITMEN dalam penyampaian laporan capaian kinerja yang disampaikan UPT ke Kantor Wilayah setiap bulannya;
  - Pentingnya peran pimpinan untuk melakukan PEMANTAUAN terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas elektronik (TNDE);
  - *REVIEW* dilakukan oleh setiap pelaksanaan kinerja anggaran , agar laporan capaian kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya;
  - PERHATIAN KHUSUS dilakukan apabila dalam penyampaian laporan capaian kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
  - PENYELESAIAN penyampaian laporan oleh Kantor Wilayah selaku satuan kerja pembina di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap triwulan setiap tahunnya.
4. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui monitoring progres pencapaian Perjanjian Kinerja dengan melihat indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala UPT.
5. Seluruh Kantor Wilayah dan UPT telah menyelenggarakan SPIP dan mengimplementasikan Manajemen Risiko untuk pencegahan pungli dan gratifikasi.
6. Pelaksanaan kebijakan terbaru mengenai revisi anggaran bahwa setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui Kantor Wilayah.
7. Melakukan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan UPT melalui SIPP dan media lainnya setiap hari.
8. Seluruh Satuan Kerja untuk tetap melakukan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

## D. Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,80
2	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0.83%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan	11 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	0 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan	5 Laporan
6	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	13%
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	11 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	159%

		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	246%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	97,29%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	320%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	0,31%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	0 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	0 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82%	100%
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	41.86%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	58%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	92,91%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	71%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	57,55
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	23,97%
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang	80%	100%

		dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	69%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	31%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	52%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	83%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	77,77%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	640%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	83%
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	87,87%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang	80%	100%

		mengalami gangguan mental dapat tertangani		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	81,81%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	100%
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	Indeks Penilaian berasal dari Ditjen Imigrasi dan diperoleh pada akhir tahun.
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	Indeks Penilaian berasal dari Ditjen Imigrasi dan diperoleh pada akhir tahun.

## E. Hasil Evaluasi Capaian Target Kinerja B06 Triwulan II Tahun 2023

Merujuk Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan B06 Monitoring Kinerja. Progres pelaksanaan target kinerja B04, B05 dan B06 pada website [www.kinerja.kemenkumham.go.id](http://www.kinerja.kemenkumham.go.id) dengan capaian target kinerja sebagai berikut:

- **Divisi Administrasi** telah melaksanakan 100% target kinerja di B04 s/d B06 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pemasarakatan** telah melaksanakan 100% target kinerja di B04 s/d B06 dan telah melakukan unggah data dukung ke website t target kinerja;
- **Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan 100% target kinerja di B04 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan 100% target kinerja di B04 s/d B06 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara pada Triwulan II B04, B05 dan B06 telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target Kinerja yang telah disusun oleh Kementerian. Tim Evaluasi Kantor Wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja B06 Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan data dukung yang telah di laporkan melalui aplikasi Target Kinerja Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

➤ **DIVISI ADMINISTRASI**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	ACTION PLAN	KET
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>				
1	<b>Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022</b>			
	<b>B04</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	1. Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester I 2. Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	1. Terlaksananya penyusunan laporan kinerja semester I 2. Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP</b>			
	<b>B06</b>	Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi</b>			
	<b>B06</b>	1. Kantor Wilayah melakukan analisis terhadap revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan <i>value for money</i> 2. Membuat berita acara <i>clearence</i> atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien 3. Kantor Wilayah mengusulkan seluruh revisi anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan	1. Laporan analisis terhadap revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar sesuai dengan <i>value for money</i> 2. Berita acara <i>clearence</i> atas usulan revisi anggaran belanja modal satuan kerja agar akuntabel dan efektif efisien 3. Laporan usulan seluruh revisi anggaran belanja modal kanwil beserta satuan kerjanya kepada sekretariat jenderal cq Biro Perencanaan dan Biro Keuangan	<b>Sudah Di Upload</b>

<b>4</b>	<b>Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN</b>			
	<b>B06</b>	Koordinasi dengan pihak terkait untuk pengusulan sertifikasi tanah	Laporan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengusulan sertifikasi tanah	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>5</b>	<b>Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan</b>			
	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan</b>			
	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah</b>			
	<b>B06</b>	Pemanfaatan aplikasi khusus dan penyesuaian aplikasi di wilayah ke Pusdatin	Laporan pemanfaatan aplikasi khusus dan penyesuaian aplikasi di wilayah ke Pusdatin	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>8</b>	<b>Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya</b>			
	<b>B04</b>	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	1. Daftar akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	1. Daftar akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	1. Daftar akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>9</b>	<b>1. Meningkatkan kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)</b>			
	<b>B06</b>	1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ Workshop/lokakarya	1. SK Peserta 2. Laporan pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan /Workshop/lokakarya	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil</b>			
	<b>B06</b>	Melakukan digitalisasi arsip	Terlaksananya digitalisasi arsip	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>11</b>	<b>Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan</b>			
	<b>B06</b>	Kanwil melaksanakan rapat evaluasi	Terlaksananya rapat evaluasi	<b>Sudah</b>

		kinerja di tingkat Satuan Kerja	kinerja di tingkat Satuan Kerja	<b>Di Upload</b>
--	--	---------------------------------	---------------------------------	------------------

➤ **DIVISI PEMASYARAKATAN**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	<b>Percepatan pelaksanaan <i>back to basic</i> penyelenggaraan Pemasarakatan di bidang pelayanan tahanan</b>			
	<b>B04</b>	Melaksanakan Dilkumjakpol terkait upaya penanganan <i>overstaying</i> tahanan	Terlaksananya Dilkumjakpol terkait upaya penanganan <i>overstaying</i> tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	<i>Mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan <i>overstaying</i> tahanan	<i>Mapping</i> data dan konsolidasi data tahanan, data tahanan <i>overstaying</i> tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Konsolidasi data upaya penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	Konsolidasi data upaya penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Percepatan pelaksanaan <i>back to basic</i> penyelenggaraan Pemasarakatan di bidang pemenuhan hak tahanan di Lapas dan Rutan</b>			
	<b>B04</b>	Asistensi pelaksanaan fasilitas bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan miskin	Terlaksananya asistensi pelaksanaan fasilitas bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan miskin	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Supervisi pelaksanaan kegiatan pelayanan tahanan	Terlaksananya supervisi pelaksanaan kegiatan pelayanan tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pemetaan data tahanan yang mendapatkan pelayanan hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	Terpetakannya data tahanan yang mendapatkan pelayanan hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pamasarakatan di bidang pengelolaan basan baran</b>			
	<b>B04</b>	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
4	<b>Penyelenggaraan layanan rehabilitasi Pemasarakatan</b>			
	<b>B04</b>	Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan Tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>

	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
5	<b>Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui pertukaran data SPPT TI</b>			
	<b>B04</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
6	<b>Piloting penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting</b>			
	<b>B04</b>	Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi tentang peran Pemasarakatan dalam penerapan keadilan restoratif ke Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setempat	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi tentang Peran Pemasarakatan dalam penerapan Keadilan Restoratif ke Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setempat	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Pelaksanaan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan Pemasarakatan	Laporan pelaksanaan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan Pemasarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasarakatan	Laporan pelaksanaan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan Pemasarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
7	<b>Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikas</b>			
	<b>B04</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
8	<b>Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian</b>			
	<b>B04</b>	1. 1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret	1. 1.60% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.60% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.60% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.60% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Maret	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April	1.65% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.65% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.65% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.65% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan April	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei.	1.70% narapidana mengikuti program kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. 2.70% narapidana mengikuti program kemampuan intelektual. 3.70% narapidana mengikuti program pembinaan kesadaran beragama. 4.70% narapidana mengikuti program kesehatan jasmani. 5.Evaluasi pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana pada bulan Mei	<b>Sudah Di Upload</b>
9	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</b>			
	<b>B04</b>	1.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuisi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah 2.Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan	1.Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuisi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Tengah 2.Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3.Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B05</b>	1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuisi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur 2. Agen Unit Intelijen Masyarakat membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Masyarakat	1. Melaksanakan penguatan kepada petugas melalui Konsultasi Teknis terkait pembentukan dan tuisi kepada anggota UIP sesuai undangan dari Kanwil di Wilayah Indonesia Bagian Timur 2. Agen Unit Intelijen Masyarakat membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Masyarakat	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Masyarakat membuat laporan kegiatan intelijen 3. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Masyarakat	1.327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Masyarakat membuat laporan kegiatan intelijen 3. Monev pemetaan tingkat kerawanan gangguan kamtib 4. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Masyarakat	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan informasi paten</b>			
	<b>B04</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

<b>NO</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>DATA DUKUNG ACTION PLAN</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN</b>				
<b>1</b>	<b>Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)</b>			
	<b>B06</b>	1.Penerapan Paspor Online 2.Evaluasi Penerapan Paspor Online oleh Divisi Keimigrasian kepada Satuan Kerja	1.Penerapan Paspor Online 2.Evaluasi Penerapan Paspor Online oleh Divisi Keimigrasian kepada Satuan Kerja	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)</b>			
	<b>B06</b>	Pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	Pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing</b>			
	<b>B06</b>	1.Pelaksanaan pendataan penjamin orang asing 2.pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah	1.Terlaksananya pendataan penjamin orang asing 2.pengecekan lapangan keberadaan penjamin orang asing di daerah	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>				
<b>1</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</b>			
	<b>B04</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023</b>			
	<b>B05</b>	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap I	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap I	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah</b>			
	<b>B06</b>	1. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan 3. Pengolahan data hasil verifikasi lapangan 4. Penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi) 5. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I)	1. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I) 2. Pelaksanaan verifikasi lapangan 3. Pengolahan data hasil verifikasi lapangan 4. Penyampaian laporan hasil verifikasi lapangan ke UPT (termasuk model intervensi) 5. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Januari – Maret 2023 (Triwulan I)	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
4	<b>Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham</b>			
	<b>B04</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
5	<b>Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)</b>			
	<b>B04</b>	Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	Persiapan dan koordinasi awal Penyebaran Informasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Penyebaran informasi layanan Apostille	Penyebaran informasi layanan Apostille	<b>Sudah Di Upload</b>
6	<b>Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris</b>			
	<b>B06</b>	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
7	<b>Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil &amp; Pengwil.</b>			
	<b>B06</b>	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 50% dari jumlah Notaris di wilayah.	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 50% dari jumlah Notaris di wilayah.	<b>Sudah Di Upload</b>
8	<b>Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</b>			
	<b>B04</b>	Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Sosialisasi kepada partai politik tingkat provinsi terkait pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B05</b>	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>9</b>	<b>Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.</b>			
	<b>B04</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek</b>			
	<b>B04</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B06</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/ Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>11</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah</b>			
	<b>B04</b>	Inventarisasi layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi lainnya : 1.IP Clinic 2.Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC/ 1 tahun)	Inventarisasi layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota/Kab/instansi lainnya : 1.IP Clinic 2.Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC/ 1 tahun)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya: 1.IP Clinic 2.Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	Terlaksananya layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya: 1.IP Clinic 2.Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya: 1.IP Clinic 2.Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	Terlaksananya layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1.IP Clinic 2.Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>12</b>	<b>Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria</b>			
	<b>B04</b>	- Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI - Verifikasi Data Kandidat KKC.	- Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI - Verifikasi Data Kandidat KKC.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	- Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI - Verifikasi Data Kandidat KKC.	- Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI - Verifikasi Data Kandidat KKC.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	- Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI - Verifikasi Data Kandidat KKC.	- Inventarisasi Kandidat KKC dan Koordinasi dengan DJKI - Verifikasi Data Kandidat KKC.	
<b>13</b>	<b>Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten</b>			
	<b>B01</b>	Memetakan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Terlaksananya pemetaan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang di Wilayah Maluku Utara	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>14</b>	<b>Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)</b>			

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B06</b>	Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional	Terlaksananya penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/ Kota dan pusat belanja tradisional	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>15</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM</b>			
	<b>B04</b>	Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04	Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B04	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B04	Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B04	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	Koordinasi dan konsultasi persiapan pelaporan Aksi HAM periode B08	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>16</b>	<b>Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM</b>			
	<b>B04</b>	Mengunggah dokumen Pelaporan KKP HAM Pemda masing-masing Wilayah ke website Aplikasi (kkpham.kemenkumam.go.id)	Mengunggah dokumen Pelaporan KKP HAM Pemda masing-masing Wilayah ke website Aplikasi (kkpham.kemenkumam.go.id)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM	Menginventarisir hasil pelaporan KKP HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengisian formulir indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>17</b>	<b>Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM</b>			
	<b>B04</b>	Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B05</b>	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B06</b>	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan I	<b>Sudah Di Upload</b>

## F. Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah melaksanakan pemenuhan data dukung dan pelaksanaan kegiatan target kinerja hingga Juni tahun 2023 seperti yang dilaporkan pada laporan ini. Adapun data realisasi anggaran per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	REALISASI	%
1	Rutan Weda	958.384.128	639.037.946	-	1.597.422.074	72,76%
2	Lembaga Pemasarakatan Jailolo	1.515.893.154	791.665.267	-	2.307.558.421	71,22%
3	Lpka Ternate	1.958.241.270	955.131.389	-	2.913.372.659	64,09%
4	Rupbasan Ternate	826.176.670	508.551.500	-	1.334.728.170	67,26%
5	Balai Pemasarakatan Ternate	1.376.520.751	417.931.300	-	1.794.452.051	63,60%
6	Lapas Perempuan Ternate	1.613.988.665	762.667.772	-	2.376.656.437	54,52%
7	Rumah Tahanan Negara Soasiu	1.393.195.707	921.261.975	-	2.314.457.682	55,14%
8	Setjen	4.298.315.125	3.210.904.189	182.142.500	7.691.361.814	58,13%
9	Rumah Tahanan Negara Ternate	2.031.938.382	1.185.988.275	-	3.217.926.657	60,89%
10	Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo	925.125.047	1.934.765.531	782.070.000	3.641.960.578	55,24%
11	Lembaga Pemasarakatan Tobello	1.960.373.383	1.328.407.961	-	3.288.781.344	61,37%
12	Lapas Kelas III Labuha	1.254.710.963	860.572.759	-	2.115.283.722	58,29%
13	Lembaga Pemasarakatan Sanana	1.907.043.912	842.751.065	-	2.749.794.977	52,96%
14	Ditjen PP	-	154.806.000	-	154.806.000	56,91%
15	Lembaga Pemasarakatan Ternate	2.135.783.426	1.738.402.285	-	3.874.185.711	49,97%
16	Ditjen Pemasarakatan	-	359.735.110	-	359.735.110	50,03%
17	Ditjen AHU	-	1.213.174.750	-	1.213.174.750	54,30%
18	Ditjen KI	-	861.032.980	-	861.032.980	54,24%
19	Balitbangham	-	131.904.189	-	131.904.189	52,07%
20	Ditjen HAM	-	144.650.000	-	144.650.000	51,01%
21	BPHN	-	679.057.000	-	679.057.000	51,57%

22	Ditjen Imigrasi	-	874.452.259	-	874.452.259	51,07%
23	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	1.660.520.944	2.916.676.868	219.839.650	4.797.037.462	48,96%
24	Bapas Kelas II Tidore	818.610.548	496.215.095	-	1.314.825.643	24,69%
		<b>26.634.822.075</b>	<b>23.929.743.465</b>	<b>1.184.052.150</b>	<b>51.748.617.690</b>	<b>55,12%</b>

## G. Simpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan pemenuhan data dukung target kinerja B04, B05, dan B06. Selain itu, diperlukan upaya preventif untuk mengurangi potensi permasalahan dan kendala pelaksanaan target kinerja pada Triwulan yang akan datang.

Adapun rekomendasi berupa saran yang dapat disampaikan dari hasil evaluasi capaian target kinerja berupa pemantauan dan analisis pencapaian target dari aplikasi kinerja Kemenkumham ini, dapat dijabarkan sbb:

- a. Senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pemenuhan data dukung target kinerja secara keseluruhan dengan para unit eselon I terkait agar memastikan nilai target kinerja dapat memperoleh nilai 100;
- b. Pada Triwulan berikutnya, akan rutin diadakan rapat bersama masing-masing divisi terkait capaian target kinerja setiap bulannya melalui aplikasi zoom sehingga pelaksanaan penginputan data dukung target kinerja dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

## H. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan II Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.



Ternate, 30 Juni 2023

Kepala Divisi Administrasi

Andi Basmal

NIP. 197202151992031002

# LAMPIRAN

# DOKUMENTASI

## RAPAT PELAKSANAAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA TRIWULAN II TAHUN 2023





malut.kemenkumham.go.id Kanwil Kemenkumham Malut kemenkumhammalut malut\_kumham



malut.kemenkumham.go.id Kanwil Kemenkumham Malut kemenkumhammalut malut\_kumham

**NOTA DINAS**  
**Nomor : W.29.PR.02.02 -3298**

Yth : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Dari : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara  
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B06 Tahun 2023  
Lampiran : -  
Tanggal : 30 Mei 2023

---

Dalam rangka rencana evaluasi dan pengendalian pencapaian Target Kinerja B06 Kantor Wilayah Tahun 2023, Divisi Administrasi akan mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B06 Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bersama ini dengan hormat kami mengundang 1 orang pejabat serta 1 orang operator yang membidangi Pelaporan serta pengelola anggaran untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023  
Pukul : 14.00 WIT s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkumham Maluku Utara  
Pakaian : Pakaian PDH III

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Andi Basmal  
NIP. 197202151992031002

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**  
Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Ternate  
Telepon (0921) 3122119 Faksimile (0921) 3122118  
Website: [www.malut.kemenkumham.go.id](http://www.malut.kemenkumham.go.id) Email: [perencanaan.malut@gmail.com](mailto:perencanaan.malut@gmail.com)

---

**NOTULA KEGIATAN EVALUASI TARGET KINERJA B06**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**  
**TAHUN 2023**

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Mei 2023  
Pukul : 14.00 WIT s.d 16.00 WIT  
Tempat : Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara  
Peserta :  

1. Kantor Wilayah terdiri dari Kepala Divisi Administrasi;
2. Kantor Wilayah terdiri dari Para Kepala Bagian
3. Kantor Wilayah terdiri dari Subbidang Dan Subbagian

Agenda :  

1. Paparan Evaluasi Target Kinerja B06 Dari Kepala Divisi Administrasi

Hasil Kegiatan:  

1. Kepala Divisi Administrasi Bapak Andi Basmal membuka Rapat sekaligus menyampaikan Hasil capaian target kinerja setiap Divisi Dan Subbidang melalui paparan Evaluasi Target Kinerja B06.
2. Terdapat 1 Subbidang dan 1 Divisi yang pada Triwulan ke II ini capaian realisasi anggarannya sudah melebihi dari target yang ditetapkan (B06 46,35%). Yaitu Subbidang BPHN (48,75%) dan Divisi Pemasyarakatan (48,3%)
3. Bapak Andi Basmal selaku Kepala Divisi Administrasi juga menyampaikan kepada Subbagian Program dan Pelaporan untuk dapat memverifikasi laporan target kinerja setiap Divisi dan Subbidang.

4. Di akhir rapat, Bapak Andi Basmal selaku Kepala Divisi Administrasi menyampaikan kepada semua Kepala Subbidang Dan Subbagian untuk lebih memperhatikan pelaporan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan.

Notulen



Nova Mustika  
NIP.19891105 201012 2 003

Mengetahui,  
Kepala Bagian Program dan Humas



Irwan Kadir  
NIP. 198102042002121001



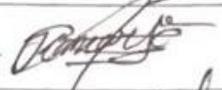
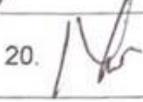
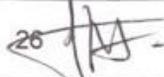
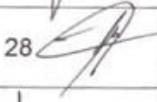
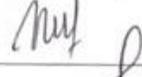
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA  
Jl. CengkehAfo No. 40 Ternate  
Telepon : (0921)3122119 Faksimile : (0921) 3122118

## ABSENSI

TANGGAL : 31 Mei 2023

KEGIATAN : Rapat Evaluasi kinerja satuan kerja B06 Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Andi Basmal	Kepala Divisi Administrasi	1.
2	Iwan Kadir	Kasub PA	2.
3	Zulfikar G.	Fabid Yankum	3.
4	M KASIM UMASANGADI	KABAG UMUM	4.
5	SUDIRMAN ZA	KASID KEAMANAN	5.
6	Jufri Hamid	Kasubag Program dan Pelaporan	6.
7	M-UMBAR	KASUBID PPTM	7.
8	Eni Rumasing	Kand Litig	8.
9	Muhammad Iqbal	Pelaksana	9.
10	Agneswati Bistara	JFT	10.
11	Ridwan Lobubun	Penyusun Laporan Haric Evaluasi	11.
12	Joko Gusnur	JFu	12.
13	Moralisa	JFU	13.
14	Nova Mustika	JFu	14.

15	SYAFI UDINI		15. 
16	GUNTA SATWA	JF	<del>16. </del>
17	RASDAWI JANNAH	JAV	17. 
18	Alhikmah		18. 
19	M. KOEMARUDDIN		19. 
20	Nurcah Marizka k.	Jtu	20. 
21	HARUATI .c	JAT	21. 
22	Muhammad faqih		22. 
23	Muh. Irfan	JFT	23. 
24	Nasrum Asid	JFU	24. 
25	Muhammad Drajat	JFU	25. 
26	Ermiyastuti	Kasubus Humas	26. 
27	Rusli M Djaumar	JFU	27. 
28	ABULHAMID RIZKIYAH	JFU	28. 
29	Nhaya Tuhuten	SDA	29. 
30	Abdu S. Tilawat.	Kasubid.	30. 

Kepala Bagian Program dan  
Hubungan Masyarakat

  
Irwan Kadir  
NIP. 19810204 200212 1 001



# EVALUASI KINERJA TRIWULAN KE II TA.2023



**REFORMASI  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

**ARAHAN KEPALA DIVISI ADMINISTRASI**

01

**KOMITMEN** dalam penyampaian Laporan Kinerja yang disampaikan UPT ke KANTOR WILAYAH setiap bulannya,

02

Pentingnya peran Pimpinan untuk melakukan **PEMANTAUAN** terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas.

03

**REVIEW** dilakukan oleh setiap pelaksana kinerja anggaran, agar laporan kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya.

04

**PERHATIAN KHUSUS** dilakukan apabila dalam penyampaian laporan kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

05

**PENYELESAIAN** penyampaian Laporan oleh kantor wilayah selaku satuan kerja pembina di Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap Triwulan setiap tahunnya.

# TARGET KINERJA TAHUN 2023

Kepmenkumham : Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022





# EVALUASI CAPAIAN TARGET KINERJA (TARJA) TRIWULAN I (B-03) TA 2023



**DIV. ADMINISTRASI**

**100 %**



**DIV. IMIGRASI**

**100 %**



**DIV. YANKUM**

**100. %**



**DIV. PEMASYARAKATAN**

**99.5 %**



# TARGET RENCANA PENARIKAN DANA TRIWULAN I (B-06) TA 2023

NO	SATUAN KERJA	PAGU	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	JUMLAH	93,886,651	3,974,583	6,657,435	7,007,898	9,062,082	7,801,615	9,010,279	9,762,644	8,940,334	9,249,185	8,087,339	7,279,129	7,054,127
1.	% RPD PER BULAN		4.23%	7.09%	7.46%	9.65%	8.31%	9.60%	10.40%	9.52%	9.85%	8.61%	7.75%	7.51%
2.	TOTAL RPD KUMULATIF PER BULAN		3,974,583	10,632,018	17,639,916	26,701,998	34,503,613	43,513,892	53,276,537	62,216,870	71,466,056	79,553,394	86,832,524	93,886,651
3.	% RPD KUMULATIF PER BULAN		4.23%	11.32%	18.79%	28.44%	36.75%	46.35%	56.75%	66.27%	76.12%	84.73%	92.49%	100.00%
4.	% RPD PER TRIWULAN		18.79%			27.56%			29.77%			23.88%		
5.	% RPD KUMULATIF PER TRIWULAN		18.79%			46.35%			76.12%			100.00%		
6.	RPD BELANJA PEGAWAI PER TRIWULAN (BP)		8,621,333			11,496,736			10,699,052			9,170,628		
7.	% RPD BELANJA PEGAWAI PER TRIWULAN (BP)		21.56%			28.75%			26.76%			22.93%		
8.	RPD BELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN (BO)		2,117,375			3,131,704			3,791,967			3,551,146		
9.	% RPD BELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN (BO)		16.81%			24.87%			30.11%			28.20%		
10.	RPD BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN (BN)		5,835,546			9,197,977			12,003,459			8,399,567		
11.	% RPD BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN (BN)		16.47%			25.96%			33.87%			23.70%		
12.	RPD BELANJA MODAL PER TRIWULAN (BM)		1,065,663			2,047,559			1,457,685			1,299,255		
13.	% RPD BELANJA MODAL PER TRIWULAN (BM)		18.15%			34.88%			24.83%			22.13%		

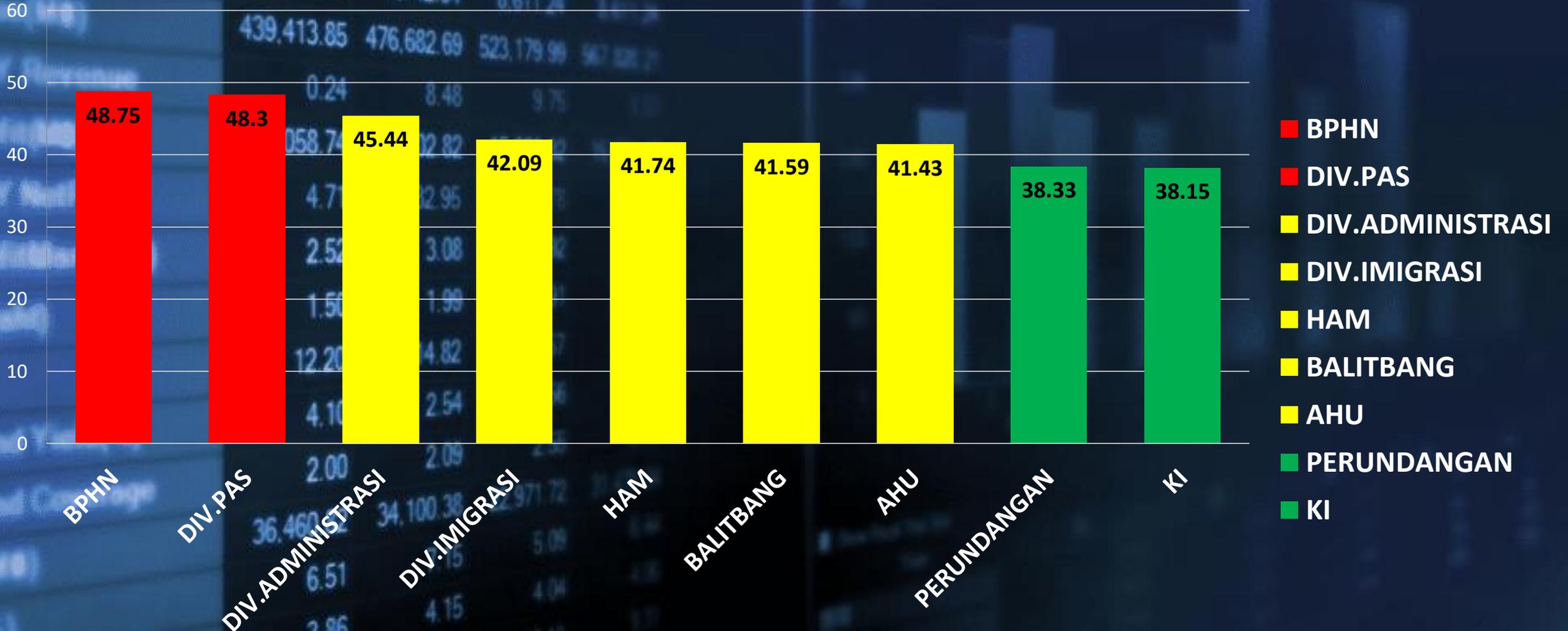
# REALISASI ANGGARAN 9 DIPA KANWIL

KANWIL MALUKU UTARA 26 MEI 2023

TARGET  
CAPAIAN

B05 36.75 %  
B06 46.35 %

REALISASI



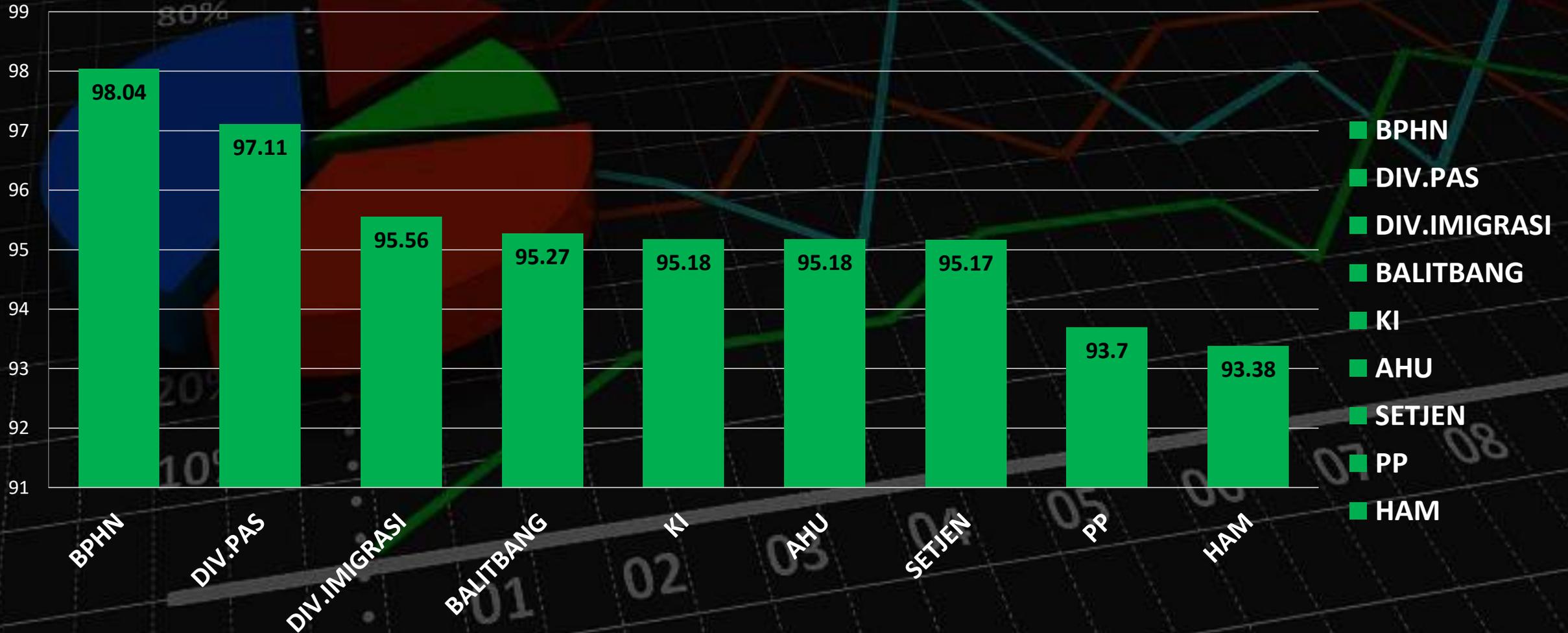


# REALISASI ANGGARAN SELURUH SATKER

No	Kode   Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	684003   RUTAN WEDA	972,514,000	725,094,759	74.56%	1,222,969,000	563,949,181	46.11%	-	-	0.00%	2,195,483,000	1,289,043,940	906,439,060	58.71%
2	497840   LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1,770,543,000	1,151,596,907	65.04%	1,469,707,000	683,091,146	46.48%	-	-	0.00%	3,240,250,000	1,834,688,053	1,405,561,947	56.62%
3	632712   RUPBASAN TERNATE	1,187,415,000	606,079,820	51.04%	772,474,000	413,521,500	53.53%	24,497,000	-	0.00%	1,984,386,000	1,019,601,320	964,784,680	51.38%
4	352614   LPKA TERNATE	2,639,715,000	1,486,652,082	56.32%	1,906,326,000	783,423,282	41.10%	-	-	0.00%	4,546,041,000	2,270,075,364	2,275,965,636	49.94%
5	626161   BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1,909,234,000	1,035,430,304	54.23%	912,162,000	360,065,300	39.47%	-	-	0.00%	2,821,396,000	1,395,495,604	1,425,900,396	49.46%
6	649029   BPHN	-	-	-	1,316,698,000	641,944,000	48.75%	-	-	-	1,316,698,000	641,944,000	674,754,000	48.75%
7	649024   DITJEN PEMASYARAKATAN	-	-	-	719,077,000	347,295,110	48.30%	-	-	-	719,077,000	347,295,110	371,781,890	48.30%
8	407499   RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2,907,790,000	1,554,053,838	53.44%	2,376,721,000	981,571,807	41.30%	-	-	0.00%	5,284,511,000	2,535,625,645	2,748,885,355	47.98%
9	109152   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2,750,632,000	1,484,875,371	53.98%	2,608,129,000	1,043,614,199	40.01%	-	-	0.00%	5,358,761,000	2,528,489,570	2,830,271,430	47.18%
10	649022   SETJEN	6,793,124,000	3,224,302,379	47.46%	6,256,618,000	2,606,265,016	41.66%	182,345,000	182,142,500	99.89%	13,232,087,000	6,012,709,895	7,219,377,105	45.44%
11	407503   LAPAS KELAS III LABUHA	1,761,309,000	932,892,790	52.97%	1,867,317,000	702,003,017	37.59%	-	-	0.00%	3,628,626,000	1,634,895,807	1,993,730,193	45.06%
12	418350   LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2,887,801,000	1,227,601,804	42.51%	1,471,669,000	694,780,257	47.21%	-	-	0.00%	4,359,470,000	1,922,382,061	2,437,087,939	44.10%
13	649025   DITJEN IMIGRASI	-	-	-	1,712,140,000	720,571,402	42.09%	-	-	-	1,712,140,000	720,571,402	991,568,598	42.09%
14	649028   DITJEN HAM	-	-	-	283,561,000	118,360,000	41.74%	-	-	-	283,561,000	118,360,000	165,201,000	41.74%
15	649030   BALITBANGHAM	-	-	-	253,345,000	105,364,660	41.59%	-	-	-	253,345,000	105,364,660	147,980,340	41.59%
16	649023   DITJEN AHU	-	-	-	2,234,412,000	925,699,750	41.43%	-	-	-	2,234,412,000	925,699,750	1,308,712,250	41.43%
17	662968   KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1,418,144,000	693,399,760	48.89%	4,293,298,000	1,506,429,966	35.09%	881,975,000	500,000,000	56.69%	6,593,417,000	2,699,829,726	3,893,587,274	40.95%
18	109153   LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3,013,380,000	1,432,031,031	47.52%	2,178,567,000	644,731,123	29.59%	-	-	0.00%	5,191,947,000	2,076,762,154	3,115,184,846	40.00%
19	649027   DITJEN PP	-	-	-	272,000,000	104,251,000	38.33%	-	-	-	272,000,000	104,251,000	167,749,000	38.33%
20	649026   DITJEN KI	-	-	-	1,587,436,000	605,637,980	38.15%	-	-	-	1,587,436,000	605,637,980	981,798,020	38.15%
21	652827   LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3,732,598,000	1,646,880,844	44.12%	4,019,848,000	1,306,312,445	32.50%	-	-	0.00%	7,752,446,000	2,953,193,289	4,799,252,711	38.09%
22	480505   KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2,826,275,000	1,256,072,077	44.44%	5,910,514,000	2,163,028,140	36.60%	1,060,250,000	219,839,650	20.73%	9,797,039,000	3,638,939,867	6,158,099,133	37.14%
23	531891   RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2,723,091,000	1,051,682,064	38.62%	1,473,982,000	157,298,273	10.67%	-	-	0.00%	4,197,073,000	1,208,980,337	2,988,092,663	28.81%
24	632047   BAPAS KELAS II TIDORE	694,184,000	597,813,446	86.12%	978,925,000	455,581,655	46.54%	3,651,940,000	-	0.00%	5,325,049,000	1,053,395,101	4,271,653,899	19.78%
<b>TOTAL</b>		<b>39,987,749,000</b>	<b>20,106,459,276</b>	<b>50.28%</b>	<b>48,097,895,000</b>	<b>18,634,790,209</b>	<b>38.74%</b>	<b>5,801,007,000</b>	<b>901,982,150</b>	<b>15.55%</b>	<b>93,886,651,000</b>	<b>39,643,231,635</b>	<b>54,243,419,365</b>	<b>42.22%</b>

# CAPAIAN IKPA 9 DIPA KANWIL

KANWIL MALUKU UTARA 23 MEI 2023





# CAPAIAN IKPA SELURUH SATKER

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM		Capaian Output
1	632047 I BAPAS KELAS II TIDORE	100	100	99.81	100	0	100	100	100	99.96
2	684003 I Rutan Kelas II B Weda	100	100	98.51	100	100	100	100	93.33	99.53
3	497840 I LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	100	100	96.67	100	100	100	100	100	99.33
4	649029 I BPHN	100	100	92.78	0	0	98.79	100	100	98.04
5	407503 I LAPAS KELAS III LABUHA	100	100	86.87	100	100	100	100	100	97.37
6	649024 I DITJEN PEMASYARAKATAN	100	100	90.14	0	0	96.63	100	100	97.11
7	649022 I SETJEN	100	100	85.57	100	100	100	100	100	97.11
8	662968 I KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	100	100	84.69	100	100	99.79	100	100	96.92
9	109153 I LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	100	100	83.85	100	100	100	100	100	96.77
10	632712 I RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	100	94.86	92.22	0	0	100	100	97.69	96.69
11	480505 I KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	100	100	80.95	98.50	100	100	100	100	96.04
12	418350 I Lapas Perempuan Kelas III Ternate	100	88.62	85.71	100	100	100	100	100	96.00
13	649025 I DITJEN IMIGRASI	100	100	84.47	0	0	0	100	100	95.56
14	649026 I DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	100	100	79.63	100	100	0	100	100	95.47
15	649030 I BALITBANG KUMHAM	100	100	83.43	0	0	0	100	100	95.27
16	652827 I LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	100	91.30	80.56	100	100	100	100	100	95.24
17	649023 I DITJEN AHU	100	100	78.31	100	100	0	100	100	95.18
18	626161 I BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	100	72.74	91.51	0	0	100	100	100	94.47
19	531891 I RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	100	100	87.66	100	100	100	100	86.06	94.05
20	649027 I DITJEN PP	100	100	78.15	0	0	93.28	100	100	93.70
21	352614 I LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	100	100	90.22	100	100	100	100	82.29	93.62
22	649028 I DITJEN HAM	100	79.86	84.70	0	0	97.82	100	100	93.38
23	109152 I LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	100	100	86.30	100	100	100	100	78.59	91.91
24	407499 I RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	100	89.38	88.51	100	100	100	100	53.33	84.97
Total Nilai		100	96.53	87.13	99.91	100	99.32	100	95.47	95.57



**TERIMA KASIH**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

BerAKHLAK

KUMHAM  
PASTI

REFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA



**LAPORAN PELAKSANAAN  
HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
SATUAN KERJA B09 TRIWULAN III TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA**

## KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan III Tahun 2023. menghimpun evaluasi pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah sepanjang Triwulan III Tahun 2023 pada kegiatan dari bulan Januari s.d. September 2023. Penyelenggaraan evaluasi berkorelasi pada capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan III Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan III Tahun 2023, ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akurat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pengawasan pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua.  
Amin.



**Kepala Divisi Administrasi**

**Andi Basmal**  
**NIP. 197202151992031002**



---

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA B09 TRIWULAN III**  
**TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU**  
**UTARA TAHUN 2023**

## **A. Pendahuluan**

### **1. Umum**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Hukum dan HAM menetapkan target kinerja sebagai buah pikir yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM termasuk pada seluruh Kantor Wilayah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, maka diperlukan monitoring terhadap capaian target kinerja secara berkala. Monitoring tersebut dilaksanakan untuk menjamin capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.1-PR.04.05-218 tanggal 18 Maret 2023 hal Penyampaian Pelaporan Monitoring Kinerja.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melaporkan capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara secara berkala (triwulan). Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk melakukan monitoring capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada B09 Triwulan III tahun 2023.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- o. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan Monitoring Kinerja.

## B. Kegiatan yang dilaksanakan

Melakukan monitoring capaian target kinerja B04, B05, B06 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada setiap Divisi dengan kegiatan.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B06 Tahun 2023 dan Penyusunan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Yang dilaksanakan pada:
  - Hari/tanggal :Rabu, 30 Agustus 2023
  - Pukul : 14.00 WIT – Selesai
  - Pakaian : PDH III
  - Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah

Rapat ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama,Pejabat Administrasi beserta pelaksana.

2. Monitoring upload data dukung pada *website* kinerja.kemenkumham.go.id. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan data dukung pada masing-masing poin capaian target kinerja dari seluruh divisi serta ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan. Selain itu, monitoring capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian target kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara hingga pelaporan target kinerja B09 Triwulan III tahun 2023 yang telah dilaksanakan *upload* hingga tanggal 5 Oktober 2023.

## C. Hasil yang dicapai

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B09 Tahun 2023 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Rapat dilaksanakan dan membahas terkait capaian target kinerja Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh capaian kinerja pada B07, B08, B09\* telah memenuhi target yang telah ditentukan,
2. Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Bapak Andi Basmal. Dalam kesempatannya, Kepala Divisi Administrasi mengingatkan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar mampu menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara merencanakan Target Kinerja dengan baik, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan yang

direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan,

3. Percepatan capaian kinerja B09 triwulan III, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
  - KOMITMEN dalam penyampaian laporan capaian kinerja yang disampaikan UPT ke Kantor Wilayah setiap bulannya;
  - Pentingnya peran pimpinan untuk melakukan PEMANTAUAN terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas elektronik (TNDE);
  - *REVIEW* dilakukan oleh setiap pelaksana kinerja anggaran , agar laporan capaian kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya;
  - PERHATIAN KHUSUS dilakukan apabila dalam penyampaian laporan capaian kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
  - PENYELESAIAN penyampaian laporan oleh Kantor Wilayah selaku satuan kerja pembina di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap triwulan setiap tahunnya.
4. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui monitoring progres pencapaian Perjanjian Kinerja dengan melihat indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala UPT.
5. Seluruh Kantor Wilayah dan UPT telah menyelenggarakan SPIP dan mengimplementasikan Manajemen Risiko untuk pencegahan pungli dan gratifikasi.
6. Pelaksanaan kebijakan terbaru mengenai revisi anggaran bahwa setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui Kantor Wilayah.
7. Melakukan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan UPT melalui SIPP dan media lainnya setiap hari.
8. Seluruh Satuan Kerja untuk tetap melakukan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

## D. Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,85
2	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0.51%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan	11 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	0 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan	6 Laporan
6	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	13%
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	11 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	159%

		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	246%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	97,29%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	320%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	0,31%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	0 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	0 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82%	100%
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	61.86%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	68%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	92,91%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	81%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	67,55
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	53,97%
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang	80%	100%

		dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	69%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	41%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	52%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	83%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	77,77%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	640%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	83%
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	87,87%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang	80%	100%

		mengalami gangguan mental dapat tertangani		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	81,81%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	100%
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	Indeks Penilaian berasal dari Ditjen Imigrasi dan diperoleh pada akhir tahun.
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	Indeks Penilaian berasal dari Ditjen Imigrasi dan diperoleh pada akhir tahun.

### E. Hasil Evaluasi Capaian Target Kinerja B09 Triwulan III Tahun 2023

Merujuk Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan B09 Monitoring Kinerja. Progres pelaksanaan target kinerja B07, B08 dan B09 pada website [www.kinerja.kemenkumham.go.id](http://www.kinerja.kemenkumham.go.id) dengan capaian target kinerja sebagai berikut:

- **Divisi Administrasi** telah melaksanakan 100% target kinerja di B07 s/d B09 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pemasarakatan** telah melaksanakan 100% target kinerja di B07 s/d B09 dan telah melakukan unggah data dukung ke website t target kinerja;
- **Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan 100% target kinerja di B09 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan 100% target kinerja di B07 s/d B09 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara pada Triwulan III B07, B08 dan B09 telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target Kinerja yang telah disusun oleh Kementerian. Tim Evaluasi Kantor Wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja B09 Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan data dukung yang telah dilaporkan melalui aplikasi Target Kinerja Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

➤ **DIVISI ADMINISTRASI**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	ACTION PLAN	KET
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>				
1	<b>Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022</b>			
	<b>B07</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kadv dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP</b>			
	<b>B06</b>	Pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi</b>			
	-	-	-	-

<b>4</b>	<b>Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN</b>			
	<b>B09</b>	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>5</b>	<b>Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan</b>			
	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan</b>			
	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah</b>			
	<b>B09</b>	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>8</b>	<b>Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya</b>			
	<b>B07</b>	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	1. Daftar akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	1. Daftar akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	1. Setiap Satuan kerja membuat akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	1. Daftar akun yang terintegrasi dengan SIPP Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan pengisian informasi kinerja dan pemberitaan yang positif kedalam SIPP yang terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM setiap hari	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>9</b>	<b>1. Meningkatkan kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)</b>			
	<b>B07</b>	1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ Workshop/lokakarya	1. SK Peserta 2. Laporan pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan /Workshop/lokakarya	<b>Sudah Di Upload</b>

	<b>B08</b>	1.Penyusunan SK Peserta 2.Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ Workshop/lokakarya	1.SK Peserta 2.Laporan pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan /Workshop/lokakarya	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	1.Penyusunan SK Peserta 2.Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/ Workshop/lokakarya	1.SK Peserta 2.Laporan pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan /Workshop/lokakarya	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil</b>			
	<b>B07</b>	Melakukan digitalisasi arsip	Terlaksananya digitalisasi arsip	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Melakukan digitalisasi arsip	Terlaksananya digitalisasi arsip	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Melakukan digitalisasi arsip	Terlaksananya digitalisasi arsip	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>11</b>	<b>Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan</b>			
	<b>B06</b>	kanwil melaksanakan rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja	<b>Sudah Di Upload</b>

### ➤ DIVISI PEMASYARAKATAN

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>1</b>	<b>Percepatan pelaksanaan <i>back to basic</i> penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan</b>			
	<b>B07</b>	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan	Sosialisasi Penanganan Overstayign Tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	Konsolidasi data upaya penanganan overstaying tahanan dan data tahanan yang dibebaskan demi hukum pada UPT Lapas/Rutan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Percepatan pelaksanaan <i>back to basic</i> penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang pemenuhan hak tahanan di Lapas dan Rutan</b>			
	<b>B07</b>	Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	Pemetaan Data Tahanan yang Mendapatkan Pelayanan Hukum dan mengikuti kegiatan bimbingan keterampilan dan kepribadian	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin	Asistensi Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Tahanan Miskin	<b>Sudah Di Upload</b>

	<b>B09</b>	Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	Supervisi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Tahanan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pengelolaan basan baran</b>			
	<b>B07</b>	Tersedianya Layanan dan Informasi Databerbasis IT (SDP)	Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Tersedianya Layanan dan Informasi Databerbasis IT (SDP)	Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Tersedianya Layanan dan Informasi Databerbasis IT (SDP)	Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>4</b>	<b>Penyelenggaraan layanan rehabilitasi Pemasyarakatan</b>			
	<b>B07</b>	Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	Melaksanakan Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	Monitoring UPT Pemasyarakatan Percontohan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>

	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>DATA DUKUNG ACTION PLAN</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>5</b>	<b>Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan Pemasyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI</b>			
	<b>B07</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>6</b>	<b>Piloting penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting</b>			
	<b>B07</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan	<b>Sudah Di Upload</b>

		pemasyarakatan		
	<b>B09</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>7</b>	<b>Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikas</b>			
	<b>B07</b>	Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Evaluasi pelaksanaan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>

<b>NO</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>DATA DUKUNG ACTION PLAN</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>8</b>	<b>Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian</b>			
	<b>B07</b>	1. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan	1. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan Bagian Tengah	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	1. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan	1. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	1. 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen	1. 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>

		Pemasyarakatan		
<b>9</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</b>			
		-	-	-

<b>NO</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>DATA DUKUNG ACTION PLAN</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>10</b>	<b>Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan informasi paten</b>			
	<b>B07</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN</b>				
1	<b>Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)</b>			
	<b>B09</b>	1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis 2. Pengumpulan data dan evaluasi	1. Monitoring kepada Unit Pelaksana Teknis 2. Pengumpulan data dan evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Terseleenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)</b>			
	<b>B09</b>	Monitoring Pelaksanaan pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected))	Monitoring Pelaksanaan pendataan Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected))	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing</b>			
	<b>B09</b>	Monitoring konsistensi hubungan penjamin dengan orang asing yang dijamin	Monitoring konsistensi hubungan penjamin dengan orang asing yang dijamin	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>				
1	<b>Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</b>			
	<b>B07</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>

	<b>B09</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023</b>			
	<b>B07</b>	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap II	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) Tahap II	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Penyusunan Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	Penyusunan Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Penyampaian Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	Penyampaian Laporan Capaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>3</b>	<b>Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah</b>			
	<b>B09</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> <li>2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> <li>4. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan April – Juni 2023 (Triwulan II)</li> </ol>	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
4	<b>Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham</b>			
	<b>B07</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
5	<b>Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)</b>			
	<b>B07</b>	Penyebaran informasi layanan Apostille	Penyebaran informasi layanan Apostille	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Penyebaran informasi layanan Apostille	Penyebaran informasi layanan Apostille	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	<b>Sudah Di Upload</b>
6	<b>Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris</b>			
	<b>B07</b>	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
7	<b>Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil &amp; Pengwil.</b>			
	<b>B09</b>	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 75% dari jumlah Notaris di wilayah.	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 50% dari jumlah Notaris di wilayah.	<b>Sudah Di Upload</b>
8	<b>Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</b>			
	<b>B07</b>	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B08</b>	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pengkinian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengkinian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>9</b>	<b>Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.</b>			
	<b>B07</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek</b>			
	<b>B07</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan) 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B09</b>	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	1. Pelaksanaan layanan HKI melalui Mobile IP Clinic di Wilayah (persiapan, pelaksanaan 2. Layanan KI meliputi layanan Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta dan Desain Industri 3. Kanwil Koordinasi dengan stakeholder terkait Sosialisasi/Diseminasi IG atau Kanwil melakukan Pendampingan Penyusunan/Pemenuhan Kelengkapan Berkas Permohonan Indikasi Geografis	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>11</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah</b>			
	<b>B07</b>	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>12</b>	<b>Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria</b>			
	<b>B07</b>	Penentuan dan Verifikasi Data Kandidat KKC	Penentuan dan Verifikasi Data Kandidat KKC	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pengajuan Kandidat KKC ke DJKI	Pengajuan Kandidat KKC ke DJKI	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Kandidat KKC	Evaluasi Kegiatan Inventarisasi Kandidat KKC	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>13</b>	<b>Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten</b>			
	<b>B07</b>	Evaluasi kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	Evaluasi kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>14</b>	<b>Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)</b>			

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B07</b>	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>15</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM</b>			
	<b>B07</b>	Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08	Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B08	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08	Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B08	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>16</b>	<b>Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM</b>			
	<b>B07</b>	Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka evaluasi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka evaluasi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	Penginputan data indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>17</b>	<b>Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM</b>			
	<b>B07</b>	Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Semester I	<b>Sudah Di Upload</b>

## F. Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah melaksanakan pemenuhan data dukung dan pelaksanaan kegiatan target kinerja hingga Juni tahun 2023 seperti yang dilaporkan pada laporan ini. Adapun data realisasi anggaran per 25 September 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	REALISASI	%
1	Rutan Weda	972,514,000	1,222,969,000	-	2,292,046,503	104.40%
2	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	9,598,487,000	1,906,326,000	-	73,763,828,349	70.01%
3	Lpka Ternate	2,639,715,000	955.131.389	-	4,015,932,431	88.34%
4	Rupbasan Ternate	1,187,415,000	772,474,000	-	1,846,097,748	93.03%
5	Balai Pemasyarakatan Ternate	1,909,234,000	912,162,000	-	2,561,489,884	90.79%
6	Lapas Perempuan Ternate	2,887,801,000	1,461,169,000	10,500,000	3,255,925,998	74.69%
7	Rumah Tahanan Negara Soasiu	2,723,091,000	1,279,493,812	-	3,257,225,560	77.61%
8	Setjen	7,881,649,000	6,874,198,000	1,533,617,000	10,786,023,087	10,786,023,087
9	Rumah Tahanan Negara Ternate	10,786,023,087	10,786,023,087	-	5,284,511,000	87.34%
10	Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo	1,418,144,000	4,293,298,000	1,473,475,000	1,473,475,000	70.55%
11	Lembaga Pemasyarakatan Tobello	2,750,632,000	2,608,129,000	-	4,701,297,328	87.73%
12	Lapas Kelas III Labuha	1,761,309,000	1,867,317,000	-	3,079,770,965	84.87%
13	Lembaga Pemasyarakatan Sanana	3,013,380,000	2,178,567,000	-	4,160,208,862	80.13%
14	Ditjen PP	-	272,000,000	-	272,000,000	78.02%
15	Lembaga Pemasyarakatan Ternate	3,732,598,000	4,019,848,000	-	5,532,905,720	71.37%
16	Ditjen Pemasyarakatan	-	719,077,000	-	531,587,110	73.93%
17	Ditjen AHU	-	2,234,412,000	-	1,720,584,150	77.00%
18	Ditjen KI	-	1,712,140,000	-	1,264,418,580	79.65%
19	Balitbangham	-	253,345,000	-	192,564,189	76.01%
20	Ditjen HAM	-	283,561,000	-	218,408,000	77.02%
21	BPHN	-	1,316,698,000	-	1,138,226,000	86.45%

22	Ditjen Imigrasi	-	1,712,140,000	-	1,212,568,519	70.82%
23	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	2,826,275,000	5,910,514,000	1,060,250,000	6,873,329,448	70.16%
24	Bapas Kelas II Tidore	694,184,000	978,925,000	3,651,940,000	1,873,610,593	35.18%
		<b>56.782.451.087</b>	<b>56.529.917.288</b>	<b>7.729.782.000</b>	<b>141.308.035.024</b>	<b>70.01%</b>

## G. Kesimpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan pemenuhan data dukung target kinerja B07, B08, dan B09. Selain itu, diperlukan upaya preventif untuk mengurangi potensi permasalahan dan kendala pelaksanaan target kinerja pada Triwulan yang akan datang.

Adapun rekomendasi berupa saran yang dapat disampaikan dari hasil evaluasi capaian target kinerja berupa pemantauan dan analisis pencapaian target dari aplikasi kinerja Kemenkumham ini, dapat dijabarkan sbb:

- a. Senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pemenuhan data dukung target kinerja secara keseluruhan dengan para unit eselon I terkait agar memastikan nilai target kinerja dapat memperoleh nilai 100;
- b. Pada Triwulan berikutnya, akan rutin diadakan rapat bersama masing-masing divisi terkait capaian target kinerja setiap bulannya melalui aplikasi zoom sehingga pelaksanaan penginputan data dukung target kinerja dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

## H. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan III Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.



Ternate, 29 September 2023

Kepala Divisi Administrasi

Andi Basmal

NIP. 197202151992031002

# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**  
**RAPAT PELAKSANAAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN**  
**KERJA TRIWULAN III TAHUN 2023**





**NOTA DINAS**  
**Nomor : W.29.PR.02.02 -3298**

Yth : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Dari : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara  
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B06 Tahun 2023  
Lampiran : -  
Tanggal : 29 Agustus 2023

---

Dalam rangka rencana evaluasi dan pengendalian pencapaian Target Kinerja B09 Kantor Wilayah Tahun 2023, Divisi Administrasi akan mengadakan Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B09 Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bersama ini dengan hormat kami mengundang 1 orang pejabat serta 1 orang operator yang membidangi Pelaporan serta pengelola anggaran untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023  
Pukul : 14.00 WIT s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkumham Maluku  
UtaraPakaian : Pakaian PDH III

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Andi Basmal  
NIP. 197202151992031002

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**  
Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Ternate  
Telepon (0921) 3122119 Faksimile (0921) 3122118  
Website: [www.malut.kemenkumham.go.id](http://www.malut.kemenkumham.go.id) Email: [perencanaan.malut@gmail.com](mailto:perencanaan.malut@gmail.com)

---

**NOTULA KEGIATAN EVALUASI TARGET KINERJA B09  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
TAHUN 2023**

- Hari : Rabu  
Tanggal : 30 Agustus 2023  
Pukul : 14.00 WIT s.d 16.00 WIT  
Tempat : Ruang Rapat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara  
Peserta :  
  1. Kantor Wilayah terdiri dari Kepala Divisi Administrasi;
  2. Kantor Wilayah terdiri dari Para Kepala Bagian
  3. Kantor Wilayah terdiri dari Subbidang Dan Subbagian

Agenda :  
  1. Paparan Evaluasi Target Kinerja B09 Dari Kepala Divisi Administrasi

Hasil Kegiatan:

1. Kepala Divisi Administrasi Bapak Andi Basmal membuka Rapat sekaligus menyampaikan Hasil capaian target kinerja setiap Divisi Dan Subbidang melalui paparan Evaluasi Target Kinerja B09.
2. Bapak Andi Basmal selaku Kepala Divisi Administrasi juga menyampaikan kepada Subbagian Program dan Pelaporan untuk dapat memverifikasi laporan target kinerja setiap Divisi dan Subbidang.

3. Di akhir rapat, Bapak Andi Basmal selaku Kepala Divisi Administrasi menyampaikan kepada semua Kepala Subbidang Dan Subbagian untuk lebih memperhatikan pelaporan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan.

Notulen



Nova Mustika  
NIP.19891105 201012 2 003

Mengetahui,  
Kepala Bagian Program dan Humas



Irwan Kadir  
NIP. 198102042002121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA  
Jl. CengkehAfo No. 40 Ternate  
Telepon : (0921)3122119 Faksimile : (0921) 3122118

### ABSENSI

TANGGAL : 30 Agustus 2023  
KEGIATAN : Rapat Evaluasi Kinerja satuan Kerja Bas Tahun 2023

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMDI BASMAL	Kabiv ALTAIIV	1.
2	M KASIM UMASANGADJI	KABAS UMUM	2.
3	Irwan Kadir	Konag PA	3.
4	ERMIYU KASIM	Kasub. Humas	4.
5	Jufri Hamid	Kasub. Det	5.
6	HASNATI C	JFT. PRKOM	6.
7	Nurlaila Merizka.k	JFU	7.
8	Noralisa Amasani	JFU	8.
9	BERRI PRIANDI	JFU	9.
10	SYAFI UDIN	JFU	10.
11	Nova Mustika	JFU	11.
12	Syahidna J. Pataruba	JFU	12.
13	Anugrah Bell P	JFU	13.
14	Geatur SATRIA	JFU	14.

	Muh. Irfan	JPT	15. N
	Rosani Tien Laure	SFU	16. JPT
17	Hata	JTU	17. <del>JPT</del>
18	Janani Ad	JPT	18. JPT
19	Caray Dwi.	JPT	19. Du
20	Muslim Wanihon	JPT	20. Syawal

Kepala Bagian Program dan  
Hubungan Masyarakat



Irwan Kadir  
NIP. 19810204 200212 1 001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

BerAKHLAK  
BERAKHLAK BERKUALITAS

KUMHAM  
PASTI

REFORMASI  
HUKUM

PERALIHAN  
KE AGAMA ISLAM



**LAPORAN PELAKSANAAN  
HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA  
SATUAN KERJA B12 TRIWULAN IV TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

## KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2023. menghimpun evaluasi pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah sepanjang Triwulan IV Tahun 2023 pada kegiatan dari bulan Januari s.d. Desember 2023. Penyelenggaraan evaluasi berkolerasi pada capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2023, ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akurat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pengawasan pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua.  
Amin.



**Kepala Divisi Administrasi**

**Andi Basmal**  
**NIP. 197202151992031002**



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN KERJA B12 TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA TAHUN 2023**

## **A. Pendahuluan**

### **1. Umum**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Hukum dan HAM menetapkan target kinerja sebagai buah pikir yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM termasuk pada seluruh Kantor Wilayah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, maka diperlukan monitoring terhadap capaian target kinerja secara berkala. Monitoring tersebut dilaksanakan untuk menjamin capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.1-PR.04.05-218 tanggal 18 Maret 2023 hal Penyampaian Pelaporan Monitoring Kinerja.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melaporkan capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara secara berkala (triwulan). Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk melakukan monitoring capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi capaian target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada B12 Triwulan IV tahun 2023.

#### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- o. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan Monitoring Kinerja.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Melakukan monitoring capaian target kinerja B10, B11, B12 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada setiap Divisi dengan kegiatan.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B12 Tahun 2023 dan Penyusunan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :Senin, 30 Oktober 2023

Pukul : 08.30 WIT – Selesai

Pakaian : PDH II

Tempat : Aula Gamalama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Rapat ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama,Pejabat Administrasi beserta pelaksana.

2. Monitoring upload data dukung pada *website* kinerja.kemenkumham.go.id. Pelaksanaan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan data dukung pada masing-masing poin capaian target kinerja dari seluruh divisi serta ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan. Selain itu, monitoring capaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian target kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara hingga pelaporan target kinerja B12 Triwulan IV tahun 2023 yang telah dilaksanakan *upload* hingga tanggal 1 Desember 2023.

## **C. Hasil yang dicapai**

1. Rapat Evaluasi Kinerja Satuan Kerja B12 Tahun 2023 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Rapat dilaksanakan dan membahas terkait capaian target kinerja Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh capaian kinerja pada B10, B11, B12 telah memenuhi target yang telah ditentukan,
2. Rapat dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Bapak Ignatius Purwanto. Dalam kesempatannya, Kepala Kantor Wilayah mengingatkan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar mampu menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara merencanakan Target Kinerja dengan baik, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan yang

direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan dianggarkan,

3. Percepatan capaian kinerja B12 triwulan IV, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:
  - KOMITMEN dalam penyampaian laporan capaian kinerja yang disampaikan UPT ke Kantor Wilayah setiap bulannya;
  - Pentingnya peran pimpinan untuk melakukan PEMANTAUAN terhadap pelaksana penyajian laporan secara akurat dan tepat sesuai dengan tata naskah dinas elektronik (TNDE);
  - *REVIEW* dilakukan oleh setiap pelaksana kinerja anggaran , agar laporan capaian kinerja anggaran telah sesuai dengan target kinerja setiap bulannya;
  - PERHATIAN KHUSUS dilakukan apabila dalam penyampaian laporan capaian kinerja satuan kerja selalu tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
  - PENYELESAIAN penyampaian laporan oleh Kantor Wilayah selaku satuan kerja pembina di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disampaikan kepada Sekertaris Jenderal setiap triwulan setiap tahunnya.
4. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui monitoring progres pencapaian Perjanjian Kinerja dengan melihat indikator kinerja Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala UPT.
5. Seluruh Kantor Wilayah dan UPT telah menyelenggarakan SPIP dan mengimplementasikan Manajemen Risiko untuk pencegahan pungli dan gratifikasi.
6. Pelaksanaan kebijakan terbaru mengenai revisi anggaran bahwa setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui Kantor Wilayah.
7. Melakukan glorifikasi informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan UPT melalui SIPP dan media lainnya setiap hari.
8. Seluruh Satuan Kerja untuk tetap melakukan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

## D. Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,70
2	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0.60%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan	11 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan	10 Laporan
6	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	75,55%
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	12 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayanisesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	159%

		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	246%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	97,29%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	320%
		Persentase website anggota JDHNN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHNN	20%	45,45%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	0 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82%	96%
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	54%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	70%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	128%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	108%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	98%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	71,42%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	57%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	258%
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang	80%	100%

		dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	100%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	100%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	100%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	83%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal	90%	100%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	83%
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	87,87%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang	80%	100%

		mengalami gangguan mental dapat tertangani		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	81,81%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,97
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,97

#### E. Hasil Evaluasi Capaian Target Kinerja B12 Triwulan IV Tahun 2023

Merujuk Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-218 Tanggal 18 Maret 2023 Perihal Pelaporan B12 Monitoring Kinerja. Progres pelaksanaan target kinerja B10, B11 dan B12 pada website [www.kinerja.kemenkumham.go.id](http://www.kinerja.kemenkumham.go.id) dengan capaian target kinerja sebagai berikut:

- **Divisi Administrasi** telah melaksanakan 100% target kinerja di B10 s/d B12 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pemasarakatan** telah melaksanakan 100% target kinerja di B10 s/d B12 dan telah melakukan unggah data dukung ke website t target kinerja;
- **Divisi Keimigrasian** telah melaksanakan 100% target kinerja di B12 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja;
- **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM** telah melaksanakan 100% target kinerja di B10 s/d B12 dan telah melakukan unggah data dukung ke website target kinerja.

Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara pada Triwulan IV B10, B11 dan B12 telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan Target Kinerja yang telah disusun oleh Kementerian. Tim Evaluasi Kantor Wilayah Maluku Utara melakukan rapat evaluasi capaian target kinerja B12 Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan data dukung yang telah dilaporkan melalui aplikasi Target Kinerja Kemenkumham dengan rincian data sebagai berikut:

➤ **DIVISI ADMINISTRASI**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	ACTION PLAN	KET
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>				
1	<b>Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022</b>			
	<b>B10</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT	Terlaksananya pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	1. Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester II 2. Evaluasi Kinerja Mandiri 3. Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT	1. Melaksanakan Penyusunan laporan kinerja semester II 2. Evaluasi Kinerja Mandiri 3. Melaksanakan pengukuran kinerja melalui monitoring progres pencapaian PK dengan melihat indikator kinerja kakanwil, kativ dan Ka UPT	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP</b>			
	<b>B12</b>	Analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	Analisis dan evaluasi hasil penyusunan Laporan SPIP satuan kerja	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi</b>			
	-	-	-	-
4	<b>Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN</b>			
	<b>B12</b>	Laporan Perubahan status aset pada SIMAK BMN	Laporan Perubahan status aset pada SIMAK BMN	<b>Sudah Di Upload</b>
5	<b>Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan</b>			
	-	-	-	-

6	Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan		
	-	-	-
7	Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah		
	B12	Laporan	Membuat Laporan
			Sudah Di Upload
8	Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya		
	B12	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
			Sudah Di Upload
9	1. Meningkatkan kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada sistem informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)		
	B12	1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/Workshop/lokakarya 3. Evaluasi pelaksanaan Corpu	1. Penyusunan SK Peserta 2. Pelaksanaan Corpu melalui metode belajar mandiri/bimtek/komunitas belajar/pelatihan jarak jauh/seminar/konfrensi/sarasehan/Workshop/lokakarya 3. Evaluasi pelaksanaan Corpu
			Sudah Di Upload
10	Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil		
	B12	Evaluasi Arsip yang sudah digitalisasi	Terlaksananya digitalisasi arsip
			Sudah Di Upload
11	Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan		
	B06	Evaluasi Capaian Kinerja	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja di tingkat Satuan Kerja
			Sudah Di Upload

➤ **DIVISI PEMASYARAKATAN**

<b>NO</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>DATA DUKUNG ACTION PLAN</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	<b>Percepatan pelaksanaan <i>back to basic</i> penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan</b>			
	<b>B10</b>	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Percepatan pelaksanaan <i>back to basic</i> penyelenggaraan Pemasyarakatan di bidang pemenuhan hak tahanan di Lapas dan Rutan</b>			
	<b>B10</b>	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pengelolaan basan baran</b>			
	<b>B10</b>	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	<b>Sudah Di Upload</b>
4	<b>Penyelenggaraan layanan rehabilitasi Pemasyarakatan</b>			
	<b>B10</b>	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B.01-06)	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B.01-06)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B.07-09)	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B.07-09)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B.10-12)	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan (B.07-09)	<b>Sudah Di Upload</b>

	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
5	<b>Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan Masyarakatan melalui pertukaran data SPPT TI</b>			
	<b>B07</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B08</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B09</b>	Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	<b>Sudah Di Upload</b>
6	<b>Piloting penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting</b>			
	<b>B10</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan masyarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan Masyarakatan	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan Masyarakatan	Pelaksanaan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelenggaraan	<b>Sudah Di Upload</b>
7	<b>Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikas</b>			
	<b>B10</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaankemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Terlaksananya kegiatan pembinaankemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaankemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Terlaksananya kegiatan pembinaankemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Terlaksananya kegiatan pembinaankemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	Terlaksananya kegiatan pembinaankemandirian yang bekerja sama dengan mitra.	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
8	<b>Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian</b>			
	<b>B10</b>	1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan BagianTengah	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	1. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intel 2. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	1. 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen	1. 327 Lapas, 165 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban 2. Agen Unit Intelijen Pemasarakatan membuat laporan kegiatan intelijen 3. Melaksanakan konsolidasi dalam rangka membahas arah kebijakan Intelijen Pemasarakatan	<b>Sudah Di Upload</b>
9	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</b>			
		-	-	-
10	<b>Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan informasi paten</b>			
	<b>B11</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B13</b>	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	Melakukan Monitoring dan Perbaikan Anomali Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan berdasarkan Data SDP	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN</b>				
1	<b>Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)</b>			
	<b>B12</b>	Penyampaian identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor Online	Penyampaian identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap implementasi Paspor Online	<b>Sudah Di Upload</b>
2	<b>Terseleenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan Final Rejected)</b>			
	<b>B12</b>	Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan Final Reject	Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Deteni, Pencari Suaka, Pengungsi dan Final Reject	<b>Sudah Di Upload</b>
3	<b>Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing</b>			
	<b>B12</b>	Monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian	Monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran aturan keimigrasian	<b>Sudah Di Upload</b>

➤ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>				
1	<b>Terlaksananya fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.</b>			
	<b>B10</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terfasilitasnya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>

	<b>B12</b>	Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Fasilitasi Raperda yang berasal dari Pemerintah daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>2</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023</b>			
			-	-
<b>3</b>	<b>Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah</b>			
	<b>B12</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>3. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober – November 2023 (Triwulan IV)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>2. Evaluasi atas implementasi model intervensi periode bulan Juli – September 2023 (Triwulan III)</li> <li>3. Pengolahan Data hasil Survei Online IPK-IKM dan Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3AS bulan Oktober – November 2023 (Triwulan IV)</li> </ol>	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>4</b>	<b>Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham</b>			
	<b>B10</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	Terlaksananya pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	Evaluasi pelaksanaan pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 melalui aplikasi PPNS	<b>Sudah Di Upload</b>

<b>5</b>	<b>Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)</b>			
	<b>B10</b>	Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	Penyebaran informasi layanan Perseroan Perorangan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan)	Evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Perseroan Perorangan)	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>6</b>	<b>Penerapan PMPJ dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML oleh Notaris</b>			
	<b>B10</b>	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	Audit Pengawas Kepatuhan Periode Juni – Agustus 2022	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris: • Kantor Wilayah wajib melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan evaluasi sekurang- kurangnya meliputi: - Capaian dari pelaksanaan pengawasan; - Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil; - Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023	Evaluasi atas Audit Pengawas Kepatuhan Penerapan PMPJ oleh Kanwil bersama Majelis Pengawas Notaris: • Kantor Wilayah wajib melaksanakan rapat internal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan evaluasi sekurang- kurangnya meliputi: - Capaian dari pelaksanaan pengawasan; - Tantangan / kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta solusi yang diambil; - Rencana tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan tahun 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>7</b>	<b>Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil &amp; Pengwil.</b>			
	<b>B11</b>	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 100% dari jumlah Notaris di wilayah.	Pengecekan data Notaris antara database AHU, Kanwil & Pengwil terkait jumlah Notaris yang meliputi Notaris aktif, tidak aktif, meninggal dunia & pensiun dengan target 100% dari jumlah Notaris di wilayah.	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	Evaluasi Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>8</b>	<b>Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi</b>			
	<b>B10</b>	Pengkinian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengkinian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG ACTION PLAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
	<b>B11</b>	Pengkinian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	Pengkinian dan pendokumentasian data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik	Evaluasi pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>9</b>	<b>Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah.</b>			
	<b>B10</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan anak berkewarganegaraan terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Pendataan berkewarganegaraan terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Evaluasi pelaksanaan pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	Evaluasi pelaksanaan pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>10</b>	<b>Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek</b>			
	<b>B10</b>	Inventarisasi One Village One Brand dan potensi IG baru yang akan diajukan permohonan nya beserta dengan berkas kelengkapan permohonan nya dan/atau permohonan IG lama yang sudah masuk DJKI dan sudah dipenuhi kelengkapan berkas permohonan nya	Inventarisasi One Village One Brand dan potensi IG baru yang akan diajukan permohonan nya beserta dengan berkas kelengkapan permohonan nya dan/atau permohonan IG lama yang sudah masuk DJKI dan sudah dipenuhi kelengkapan berkas permohonan nya	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	1. Evaluasi hasil inventarisasi One Village One Brand dan IG 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Mobile IP Clinic Tahun 2023 3. Mengajukan permohonan pendaftaran IG kepada DJKI dan/atau dokumen-dokumen kelengkapan berkas permohonan/dokumen deskripsi permohonan IG yg sudah masuk ke DJKI	1. Evaluasi hasil inventarisasi One Village One Brand dan IG 2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Mobile IP Clinic Tahun 2023 3. Mengajukan permohonan pendaftaran IG kepada DJKI dan/atau dokumen-dokumen kelengkapan berkas permohonan/dokumen deskripsi permohonan IG yg sudah masuk ke DJKI	<b>Sudah Di Upload</b>

<b>11</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder wilayah</b>			
	<b>B10</b>	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	Pelaksanaan layanan KI melalui kolaborasi dengan Pemda Provinsi/Kota /Kab/instansi lainnya : 1. IP Clinic 2. Mobile IP Clinic (Target pelaksanaan minimal 1 kali MIC)	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Pelaksanaan evaluasi MIC serta rencana kerja pelaksanaan implementasi tahun 2024	Pelaksanaan evaluasi MIC serta rencana kerja pelaksanaan implementasi tahun 2024	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>12</b>	<b>Kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan kriteria</b>			
	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten</b>			
	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)</b>			
	<b>B10</b>	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	- Pelaksanaan penyebaran kuesioner terkait Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional - Pelaksanaan hasil validasi hasil kuesioner dan pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional dan rencana kerja KI 2024	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional dan rencana kerja KI 2024	<b>Sudah Di Upload</b>

<b>15</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM</b>			
	<b>B10</b>	Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Evaluasi pelaksanaan pelaporan capaian Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12	Notifikasi Pelaporan Aksi HAM B12	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12	Pemantauan pelaporan Aksi HAM Daerah periode B12	<b>Sudah Di Upload</b>
<b>16</b>	<b>Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM</b>			
	-	-	-	-
<b>17</b>	<b>Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM</b>			
	<b>B10</b>	Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari-September 2023	Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Januari-September 2023	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B11</b>	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Triwulan III	Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM oleh Triwulan III	<b>Sudah Di Upload</b>
	<b>B12</b>	1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III; 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan	1. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada Triwulan III; 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh Kanwil pada tahun berjalan	<b>Sudah Di Upload</b>

## F. Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah melaksanakan pemenuhan data dukung dan pelaksanaan kegiatan target kinerja hingga Desember tahun 2023 seperti yang dilaporkan pada laporan ini. Adapun data realisasi anggaran per 18 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	REALISASI	%
1	Rutan Weda	1,987,339,000	1,290,756,000	-	3,278,095,000	90.75%
2	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	2,875,943,000	1,537,369,000	-	4,352,812,000	91.15%
3	Lpka Ternate	3,575,449,000	1,708,386,000	-	5,283,835,000	97.44%
4	Rupbasan Ternate	1,550,943,000	772,474,000	24,497,000	2,347,914,000	98.57%
5	Balai Pemasyarakatan Ternate	2,529,882,000	909,162,000	-	3,439,044,000	96.31%
6	Lapas Perempuan Ternate	2,966,939,000	1,404,335,000	10,500,000	4,381,774,000	94.41%
7	Rumah Tahanan Negara Soasiu	2,649,679,000	1,726,483,000	-	4,376,162,000	96.29%
8	Setjen	7,881,649,000	7,193,872,000	1,533,617,000	16,609,138,000	89.34%
9	Rumah Tahanan Negara Ternate	3,710,499,000	2,535,034,000	-	6,245,533,000	96.00%
10	Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo	1,787,637,000	4,293,298,000	2,143,435,000	8,224,370,000	98.05%
11	Lembaga Pemasyarakatan Tobelo	3,636,164,000	2,554,140,000	-	6,190,304,000	96.21%
12	Lapas Kelas III Labuha	2,371,759,000	1,808,225,000	-	4,179,984,000	95.95%
13	Lembaga Pemasyarakatan Sanana	3,553,900,000	2,256,869,000	-	5,810,769,000	93.77%
14	Ditjen PP	-	272,000,000	-	272,000,000	99.70%
15	Lembaga Pemasyarakatan Ternate	4,048,426,000	3,588,243,000	-	7,636,669,000	95.41%
16	Ditjen Pemasyarakatan	-	719,077,000	-	719,077,000	99.61%
17	Ditjen AHU	-	2,234,412,000	-	2,234,412,000	98.78%
18	Ditjen KI	-	1,587,436,000	-	1,587,436,000	98.85%
19	Balitbangham	-	253,345,000	-	253,345,000	99.69%
20	Ditjen HAM	-	283,561,000	-	283,561,000	99.16%
21	BPHN	-	1,540,638,000	-	1,540,638,000	99.99%

22	Ditjen Imigrasi	-	1,712,140,000	-	1,712,140,000	99.21%
23	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	2,892,155,000	5,910,514,000	1,060,250,000	9,862,919,000	97.72%
24	Bapas Kelas II Tidore	1,559,123,000	978,925,000	2,784,780,000	5,322,828,000	72.95%
		49,577,486,000	49,070,694,000	7,557,079,000	106,205,259,000	94.17%

## G. Kesimpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan pemenuhan data dukung target kinerja B10, B11, dan B12. Selain itu, diperlukan upaya preventif untuk mengurangi potensi permasalahan dan kendala pelaksanaan target kinerja pada Triwulan yang akan datang.

Adapun rekomendasi berupa saran yang dapat disampaikan dari hasil evaluasi capaian target kinerja berupa pemantauan dan analisis pencapaian target dari aplikasi kinerja Kemenkumham ini, dapat dijabarkan sbb:

- a. Senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pemenuhan data dukung target kinerja secara keseluruhan dengan para unit eselon I terkait agar memastikan nilai target kinerja dapat memperoleh nilai 100;
- b. Pada Triwulan berikutnya, akan rutin diadakan rapat bersama masing-masing divisi terkait capaian target kinerja setiap bulannya melalui aplikasi zoom sehingga pelaksanaan penginputan data dukung target kinerja dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

## H. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan monitoring Pelaksanaan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.



Ternate, 18 Desember 2023

Kepala Divisi Administrasi

Andi Basmal

NIP. 197202151992031002

# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**  
**RAPAT PELAKSANAAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATUAN**  
**KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023**







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**  
Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Ternate  
Telepon (0921) 3122119 Faksimile (0921) 3122118  
Website: [www.malut.kemenkumham.go.id](http://www.malut.kemenkumham.go.id) Email: [perencanaan.malut@gmail.com](mailto:perencanaan.malut@gmail.com)

Nomor : W.29.PR.02.04-5918  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Koordinasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023  
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Maluku Utara  
Yth. 1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
2. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis.  
dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara  
di tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.29.PR.02.04-5809  
Hal: Surat Pemberitahuan dan Permintaan Peserta Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan  
Capaian Kinerja Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Maluku Utara. Bersama ini dengan hormat kami mengundang Saudara untuk hadir  
kegiatan sebagaimana dimaksud akan diselenggarakan pada

Hari : Senin s.d. Selasa  
Tanggal : 30 s/d 31 Oktober 2023  
Waktu : 08.30 WIT s/d selesai  
Tempat : Aula Gamalama Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Maluku Utara

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani oleh : Ignatius Purwanto

NIP 196703161992031001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara;
3. Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara;
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**  
Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Ternate  
Telepon (0921) 3122119 Faksimile (0921) 3122118  
Website: [www.malut.kemenkumham.go.id](http://www.malut.kemenkumham.go.id) Email: [perencanaan.malut@gmail.com](mailto:perencanaan.malut@gmail.com)

---

**NOTULA KEGIATAN EVALUASI TARGET KINERJA B12  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
TAHUN 2023**

Hari : Rabu  
Tanggal : 30 Oktober 2023  
Pukul : 08.30 WIT s.d 16.00 WIT  
Tempat : Aula Gamalama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Peserta :

1. Kantor Wilayah terdiri dari para Kepala Divisi;
2. Kantor Wilayah terdiri dari para Pejabat Administrator
3. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari para Kepala UPT Pemasarakatan dan UPT Imigrasi
4. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari dan para Operator RKA-K/L

Agenda :

1. Laporan Ketua Penyelenggara Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
2. Arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku Utara
3. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

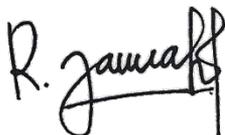
Hasil Kegiatan:

Senin, 30 Oktober 2023

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Bapak Ignatius Purwanto, membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Dalam kesempatannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian.

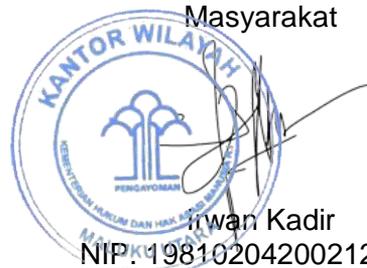
2. Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara guna memacu pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai Target Kinerja yang optimal serta mengevaluasi program kerja yang telah dilalui sampai dengan Triwulan III Tahun 2023.
3. Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan beberapa torehan prestasi yang telah dicapai tahun ini yaitu penghargaan IKPA dengan peringkat Terbaik I, Terbaik II untuk Pengelolaan Barang Milik Negara dan Terbaik II untuk Penilaian SMART di Bidang Kekayaan Intektual. Kepala Kantor Wilayah berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan dijadikan motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan program kerja di masa yang akan datang.
4. Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa rapat koordinasi hanyalah sarana bagi kita untuk mencapai tujuan utama yaitu perbaikan kualitas layanan dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terpenting adalah bagaimana kita mampu dan mau untuk berubah. Berubah menjadi Aparatur Sipil Negara yang responsif dan aktif menjalankan tugas dan fungsi secara konsisten, terarah, terukur dan tentunya secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). Namun melihat pesatnya perkembangan teknologi informasi, tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki harus selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, ASN harus mampu untuk membangun *teamwork* yang baik agar semua program-program dapat berkontribusi dengan baik.
5. dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi capaian Perjanjian Kinerja dan anggaran Triwulan III Tahun 2023 dari 8 kepala UPT Pemasarakatan dan 2 UPT Imigrasi yang disampaikan langsung oleh Kepala UPT Pemasarakatan dan UPT Imigrasi.

Notulen



Raudatul Jannah  
NIP. 198608052010012015

Mengetahui,  
Kepala Bagian Program dan Hubungan  
Masyarakat



Iwan Kadir  
NIP. 198102042002121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

Jalan Cengkeh Afo No. 40 Ternate

Telepon: (0921) 3122119 Faksimile: (0921) 3122118

Laman: malut.kemenkumham.go.id Surel: kanwilmalut@kemenkumham.go.id

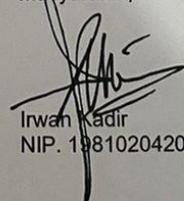
**DAFTAR HADIR PANITIA**

Hari/Tanggal : Senin/30 Oktober 2023

Kegiatan : Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja

No	NAMA/NIP	SATUAN KERJA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ignatius Purwanto NIP. 196703161992031001	Kantor Wilayah	Kepala Kantor Wilayah	1.
2.	Andi Basmal NIP. 197202151992031002	Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	2.
3.	Irwan Kadir NIP. 198102042002121001	Kantor Wilayah	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat	3.
4.	Jufri Hamid NIP. 197909152002121002	Kantor Wilayah	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	4.
5.	Guntur Satria NIP. 198812212019011001	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	5.
6.	Berri Priandi NIP. 198911092019011001	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	6.
7.	Raudatul Jannah NIP. 198608052010012015	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	7.
8.	Syafi Udin NIP. 199412162017121001	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	8.
9.	Monalisa Amasani NIP. 199309282017122001	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	9.
10.	Nova Mustika NIP. 198911052010122003	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	10.
11.	Muslim Nasution NIP. 199207282019061001	Kantor Wilayah	JFT Divisi Administrasi	11.
12.	Alhiriani NIP. 198912172022032003	Kantor Wilayah	JFT Divisi Administrasi	12.
13.	Anugrah Bella Pertiwi NIP. 199411132019012001	Kantor Wilayah	JFU Divisi Administrasi	13.
14.	Muh Irfan NIP. 199304162020121002	Kantor Wilayah	JFT Divisi Administrasi	14.

Mengetahui  
Kepala Bagian Program dan Hubungan  
Masyarakat,

  
Irwan Kadir  
NIP. 198102042002121001

